

**KEPUTUSAN IRAK MEMATUHI REGULASI OPEC PADA TAHUN 2020
DITINJAU DENGAN MENGGUNAKAN *BUREAUCRATIC POLITICS*
MODELS**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

Reyhan Naufal Alfaridzi

18323188

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

**KEPUTUSAN IRAK MEMATUHI REGULASI OPEC PADA TAHUN
2020 DITINJAU DENGAN MENGGUNAKAN *BUREAUCRATIC
POLITICS MODELS***

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

Reyhan Naufal Alfaridzi

18323188

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**KEPUTUSAN IRAK MEMATUHI REGULASI OPEC PADA TAHUN
2020 DITINJAU DENGAN MENGGUNAKAN *BUREAUCRATIC
POLITICS MODELS***

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi

(Karima Dewi Utami, S.I.P., M.A.)

Dewan Penguji

Tanda Tangan

1 **Penguji Skripsi 1**

2 **Penguji Skripsi 2**

3 **Penguji Skripsi 3**

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

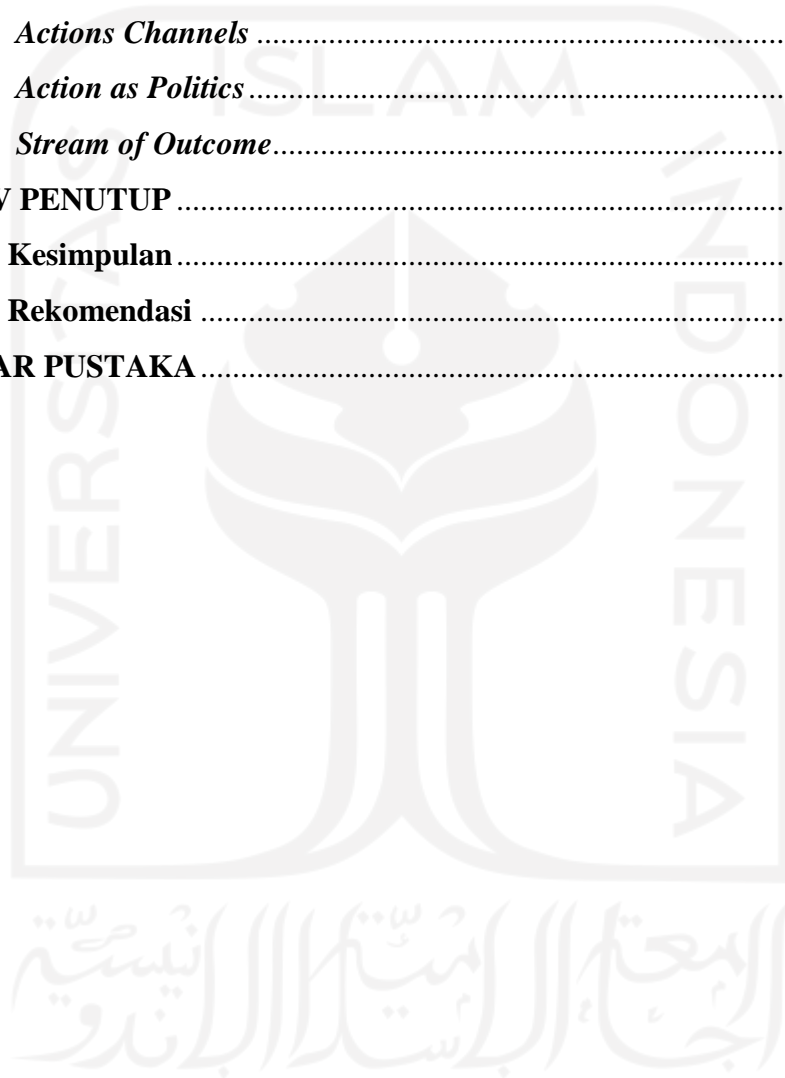
Masukkan tanggal,

Reyhan Naufal Alfaridzi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Cakupan penelitian	3
1.5 Tinjauan Pustaka	4
1.6 Kerangka Pemikiran	7
1.7 Argumen Sementara	10
1.8 Metode Penelitian	11
1.8.1 Jenis Penelitian	11
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	12
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	12
1.8.4 Proses Penelitian	12
1.9 Sistematika Pembahasan	12
BAB II RESPON IRAK TERHADAP REGULASI OPEC TENTANG PENGURANGAN JUMLAH KUOTA PRODUKSI MINYAK TAHUN 2020	14
2.1 Hubungan Irak dan OPEC	14
2.2 Irak menyetujui regulasi OPEC tahun 2020	16
2.3 Dampak yang Dihadapi oleh Irak Akibat Adanya Penerapan Regulasi OPEC Tahun 2020	18
2.4 Pengaruh Kebijakan White Paper for Economic Reform sebagai Solusi Meningkatkan Ekonomi Negara di Masa Pandemi Covid- 19, serta Kepatuhannya Terhadap Regulasi OPEC	22

BAB III ANALISIS BUREAUCRATIC POLITICS MODELS IRAK DALAM KEPUTUSANNYA UNTUK MEMATUHI REGULASI OPEC TAHUN 2020.....	29
3.1 Pembagian Posisi Aktor Pemain.....	30
3.2 <i>Parochial Priorities, Perception, and Issues</i>.....	33
3.3 <i>Interest, Stakes and Power</i>.....	37
3.4 <i>The Problem and The Problems</i>.....	40
3.5 <i>Actions Channels</i>.....	41
3.6 <i>Action as Politics</i>.....	42
3.7 <i>Stream of Outcome</i>.....	43
BAB IV PENUTUP.....	46
4.1 Kesimpulan.....	46
4.2 Rekomendasi.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	49



DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR

Tabel 3. 1 Aktor Pemain yang Termasuk ke dalam kategori Chief.....31

Tabel 3. 2 Aktor Pemain yang Termasuk ke dalam Kategori Staff 31

Tabel 3. 3 Aktor Pemain yang Termasuk ke dalam Kategori Ad Hoc..... 31

Gambar 3. 1 Laporan International Monetary Fund (IMF) 19



DAFTAR SINGKATAN

OPEC	: <i>Organization of the Petroleum Exporting Countries</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
DOC	: <i>Declaration of Cooperation</i>
BPD	: <i>Barrel Per Day</i>
PDB	: <i>Gross Domestic Product</i>
G 20	: <i>Group of Twenty</i>
WPER	: <i>White Paper for Economic Reform</i>
KRG	: <i>Kurdistan Regional Government</i>
IOC	: <i>Integrated Operation Center</i>
MOC	: <i>Missan Oil Company</i>
BOC	: <i>Basrah Oil Company</i>
TSC	: <i>Two Stage Combustion</i>
ISIS	: <i>Islamic State of Islam and Syria</i>
IFAD	: <i>The International Fund for Agricultural Development</i>
IEA	: <i>International Energy Agency</i>
MENA	: <i>Middle East and North Africa</i>

ABSTRAK

Keputusan Irak mematuhi regulasi OPEC tahun 2020 membuat Irak harus mempertimbangkan dengan kondisi negaranya yang sedang mengalami krisis ekonomi dan politik di masa pandemi Covid-19, serta kebutuhan anggaran dana yang besar untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Irak yang bersumber dari hasil perdagangan minyak. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Mustafa Al-Kadhimi, Mustafa Al-Kadhimi dituntut untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Irak, serta membawa perubahan baru terhadap kemajuan Irak di berbagai sektor. Dengan adanya keputusan Irak untuk mematuhi regulasi OPEC tahun 2020, pemerintah Irak membuat kebijakan WPER (*White Paper for Economic Reform*) yang digunakan untuk merespon regulasi OPEC tahun 2020 dan untuk menjalankan kepentingan Nasional Irak. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan konsep *Bureaucratic Politics Models* yang dikemukakan oleh Graham T. Allison.

Kata Kunci : Regulasi OPEC, WPER, *Bureaucratic Politics Models*

Iraq's decision to comply with OPEC regulations in 2020 made Iraq have to consider the condition of the country which was experiencing an economic and political crisis during the Covid-19 pandemic, as well as the need for a large budget to solve the problems that occurred in Iraq which were sourced from the oil trade. Under the leadership of Prime Minister Mustafa Al-Kadhimi, Mustafa Al-Kadhimi was required to resolve the problems that occurred in Iraq, as well as bring new changes to Iraq's progress in various sectors. With Iraq's decision to comply with OPEC regulations in 2020, the Iraqi government created a WPER (White Paper for Economic Reform) policy which was used to respond to OPEC regulations in 2020 and to carry out Iraq's national interests. In analyzing these problems, this study uses the concept of Bureaucratic Politics Models put forward by Graham T. Allison.

Keywords: OPEC Regulations, WPER, Bureaucratic Politics Models

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Irak merupakan salah satu negara yang terletak di wilayah Timur Tengah yang memiliki luas wilayah sekitar 437.072 km². Negara Irak berlokasi di sebelah utara Turki, di sebelah selatan Arab Saudi, disebelah barat Suriah, dan disebelah tenggara Kuwait. Irak memiliki cadangan sumber daya alam yang melimpah seperti minyak bumi dan gas alam. Kemudian, Irak merupakan negara yang memiliki wilayah daratan dengan mayoritas gurun, pegunungan, dataran rendah. dan Irak sendiri memiliki iklim subtropis. Kemudian, Irak menjadi salah satu negara dengan produksi minyak dan gas alam terbesar di dunia dengan pencapaian sekitar 140 barel untuk minyak bumi dan 6,4 triliun untuk gas alam. Dalam hal ini, Irak merupakan negara yang memiliki sistem pemerintahan parlementer dan Irak merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama islam (Embassy of Republic of Indonesia in Baghdad Irak n.d.).

Di dunia internasional terdapat salah satu organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara produsen minyak, organisasi internasional tersebut yaitu, OPEC (*Organization of the Petroleum Exporting Countries*) yang berdiri pada 14 September 1960 di kota Baghdad, Irak. OPEC memiliki peran penting untuk menetapkan harga minyak dunia serta, mengendalikan dan mengatur jumlah pasokan minyak bagi dunia internasional. Sejarah terbentuknya OPEC tidak lepas dari peran dari beberapa negara produsen minyak terbesar di dunia seperti, Arab Saudi, Iran, Kuwait, Venezuela, dan Irak. Dalam hal ini, Irak yang juga merupakan salah satu negara pencetus berdirinya OPEC memiliki latar belakang untuk mendukung berdirinya. Alasan Irak mendukung berdirinya OPEC pada tahun 1959 atau 1960 disebabkan oleh keputusan sepihak yang dibuat oleh perusahaan multinasional (*The Seven Sisters*) untuk menetapkan harga minyak dunia. Hal tersebut menyebabkan negara produsen minyak mengalami kerugian akibat keuntungan penjualan minyak di pasar internasional yang tidak sesuai dengan biaya produksi. Dengan adanya pentaband harga minyak dunia yang dibuat oleh perusahaan multinasional (*The Seven Sisters*), membuat negara produsen minyak

terbesar di dunia ingin membentuk organisasi internasional yang beranggotakan seluruh negara produsen minyak yang bertugas untuk menetapkan harga minyak dunia, serta menetapkan jumlah kuota produksi minyak agar dapat mengendalikan jumlah pasokan minyak di pasar internasional. Oleh karena itu, Pada tahun 1970 OPEC telah membuat kesepakatan dan perjanjian dengan beberapa perusahaan minyak internasional untuk menetapkan harga minyak dunia yang diberi nama *The Tripoli- Teheran Agreement* (Ilahi 2018).

Hubungan keanggotaan Irak dengan OPEC yang telah dimulai sejak tahun 1960 telah banyak memberikan dampak yang besar terhadap OPEC untuk mengendalikan harga minyak dunia dan pasokan minyak bagi dunia internasional. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kesuksesan OPEC dalam mengendalikan harga minyak dunia pada tahun 1990 hingga 2000 dan pada tahun 2015. Kesuksesan OPEC dalam mengendalikan harga dunia dapat dicapai dengan adanya kontribusi dan peran dari seluruh negara anggota OPEC, termasuk Irak. Meskipun Irak banyak mengalami konflik dengan sesama negara produsen minyak, Irak tetap memberikan kontribusi penuh terhadap setiap kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh OPEC (Faisol 2018). Kontribusi keanggotaan dan peran Irak terhadap OPEC dapat dibuktikan dengan keikutsertaan Irak menghadiri pertemuan negara anggota OPEC dengan negara non-anggota OPEC yang disebut dengan *Declaration of Cooperation* (DOC). Dalam pertemuan tersebut membahas terkait penetapan harga minyak bagi dunia internasional, serta membahas rencana peningkatan jumlah kuota minyak demi memenuhi permintaan pasar internasional. Dengan adanya Kebijakan tersebut, dapat memberikan keuntungan seluruh negara produsen minyak. Keuntungan tersebut diantaranya, dapat memajukan perekonomian negara yang didapat dari hasil perdagangan minyak, dapat mengembangkan dan memajukan industri minyak, dan dapat meningkatkan nilai investasi perusahaan minyak asing yang berinvestasi di negaranya (Organization of the Petroleum Exporting Countries 2019).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian analisis terhadap proses pengambilan keputusan Irak untuk mematuhi regulasi pemangkasan jumlah kuota produksi minyak yang dibuat OPEC pada tahun 2020 di masa pandemi COVID-19, serta menganalisis kebijakan

dalam negeri Irak yang dibuat setelah Irak mematuhi regulasi OPEC tahun 2020 dengan menggunakan analisis *Bureaucratic Politics Models*.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana proses pengambilan keputusan Irak untuk mematuhi regulasi OPEC tahun 2020 ditinjau dengan *Bureaucratic Politics Models*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses *Decision Making* Irak yang digunakan untuk menyetujui regulasi OPEC tahun 2020 dengan menggunakan teori *Bureaucratic Politics Models*.
2. Untuk mengetahui kebijakan dalam negeri Irak yang dibuat setelah Irak mematuhi regulasi OPEC tahun 2020.

1.4 Cakupan penelitian

Cakupan penelitian ini memiliki fokus untuk membahas proses pengambilan keputusan Irak mematuhi regulasi OPEC tahun 2020, serta berfokus untuk mengetahui kebijakan dalam negeri Irak yang dibuat setelah Irak mematuhi regulasi OPEC tahun 2020 tersebut (Martin 2022). Dalam hal ini, persetujuan Irak mematuhi regulasi OPEC tahun 2020 dilaksanakan dengan *Decision Making* yang dilakukan oleh anggota legislatif di dalam parlemen. Dengan adanya proses *Decision Making* yang terjadi di parlemen, membuat Irak akhirnya setuju untuk mematuhi regulasi OPEC tahun 2020, meskipun Irak harus menghadapi krisis politik dan ekonomi di negaranya. Keputusan Irak untuk tetap mematuhi regulasi OPEC tahun 2020 dapat memberikan konsekuensi besar yang harus dihadapi oleh pemerintah Irak. Konsekuensi tersebut diantaranya, kondisi dunia internasional yang sedang kacau akibat pandemi Covid-19, Irak mengalami krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan turunnya harga minyak dunia. Kemudian, pada tahun 2020 kondisi politik Irak mengalami krisis akibat kabinet pemerintahan negara yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan di Irak yang akhirnya menimbulkan kekecewaan dari masyarakat. Di bidang industri minyak, Irak harus tetap mematuhi regulasi OPEC tahun 2020 dengan tujuan agar dapat

mengendalikan jumlah kuota produksi minyak agar tidak berlebihan disaat harga minyak dunia yang sedang turun, serta demi menjaga kepatuhan Irak terhadap OPEC. Selain itu, setelah Irak mematuhi regulasi OPEC tahun 2020, Irak tetap harus memprioritaskan kepentingan nasionalnya dengan membuat kebijakan dalam negeri yang dibuat untuk merespon regulasi tersebut karena berdampak terhadap kondisi ekonomi Irak yang bergantung penuh terhadap perdagangan dan industri minyak. Dengan beberapa faktor tersebut, penulis mengambil cakupan penelitian pada tahun 2020. Hal tersebut disebabkan pada tahun 2020 banyak tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh Irak setelah menyetujui regulasi OPEC di tahun 2020, demi tetap mempertahankan kepentingan nasional Irak.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jurnal untuk membandingkan dan menjadi rujukan terhadap penelitian yang berjudul **“Keputusan Irak Mematuhi Regulasi OPEC Pada Tahun 2020 Ditinjau Dengan Menggunakan *Bureaucratic Politics Models*”**. Diharapkan dengan adanya beberapa rujukan mampu melengkapi penelitian penulis serta menjadi referensi.

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh H Alzuwaini, D Vasil’kov, N Kirillov, A Khitrov, V Tolmachev, R Okorov, O Gatsenko, dan D Zaripove dengan judul *“Problems of Petroleum industry in Iraq”*. Jurnal ini membahas tentang penurunan harga minyak dunia yang disebabkan oleh kondisi politik internasional yang tidak stabil dan terjadinya konflik dan perang antara Irak dengan terorisme pada tahun 2016. Dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang situasi Irak untuk memulihkan kondisi perekonomiannya yang melemah akibat adanya kebijakan penurunan harga minyak dunia. Industri minyak menjadi salah satu bidang penting bagi Irak untuk meningkatkan jumlah pendapatan negara melalui kegiatan ekspor dan kegiatan industri minyak juga berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian negara. Permasalahan utama yang harus dihadapi oleh pemerintah Irak adalah memikirkan strategi untuk menghadapi kondisi politik internasional yang melemah akibat adanya peperangan dan konflik dengan ISIS. Dengan kondisi politik internasional yang tidak stabil tersebut, berdampak pada kebijakan pemerintah Irak terkait dengan penurunan jumlah nilai investasi di bidang industri minyak. Hal tersebut

disebabkan oleh penurunan harga minyak di pasar internasional, terjadinya krisis kemanusiaan di Irak yang disebabkan oleh banyaknya jumlah pengungsi yang mengungsi di beberapa wilayah di Irak, menurunnya jumlah pencapaian kuota produksi minyak Irak yang telah ditetapkan OPEC akibat adanya perang dan konflik, dan kondisi keamanan wilayah Irak yang tidak stabil akibat adanya konflik dan perang (Alzuwaini, et al. 2018).

Jurnal tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis yaitu membahas tentang menurunnya jumlah pencapaian kuota produksi minyak akibat kondisi krisis politik dan ekonomi internasional yang disebabkan oleh sebuah peristiwa yang terjadi di dunia internasional seperti, konflik atau perang dan terjadinya suatu wabah penyakit. Sedangkan perbedaan antara jurnal tersebut dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis yaitu, penulis membahas tentang regulasi pengurangan jumlah kuota produksi minyak yang terjadi di masa pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh OPEC, dan hal tersebut menyebabkan Irak harus tetap mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh OPEC meskipun kondisi negaranya sedang mengalami krisis, dengan tujuan untuk tetap menstabilkan harga minyak dunia di masa pandemi Covid-19.

Kedua jurnal yang ditulis oleh George N. Grammas dengan judul *Multilateral Responses to the Iraqi Invasion of Kuwait: Economic Sanctions and Emerging Proliferation Controls*. Jurnal ini membahas tentang penurunan harga minyak yang disebabkan oleh adanya tindakan invasi yang dilakukan oleh negara Irak terhadap Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990 yang disebabkan oleh adanya pelanggaran yang dilakukan oleh negara Teluk dan Persia karena, melanggar regulasi terkait ketentuan jumlah kuota produksi minyak. Dalam hal ini, Irak yang merupakan salah satu negara anggota OPEC merasa bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Kuwait. Kuwait berusaha untuk melebihi jumlah kuota produksi minyak yang menyebabkan ketidaksesuaian dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh OPEC. Dengan adanya hal tersebut, menyebabkan Irak tidak terima dengan tindakan Kuwait yang melebihi jumlah kuota produksi minyak karena, dapat berdampak terhadap jumlah pasokan minyak dunia yang berpengaruh terhadap jumlah penawaran dan permintaan minyak di pasar internasional. Dengan adanya peristiwa tersebut, keputusan yang diambil oleh

OPEC dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dilakukan dengan cara melakukan tindakan mediasi antar kedua negara tersebut yang dilaksanakan di Arab Saudi dibawah pengawasan Raja Fahd. Dari hasil mediasi antar kedua negara tersebut, dapat menghasilkan sebuah kesepakatan regulasi penetapan jumlah kuota produksi minyak menjadi 22,491 juta barel per hari dan harga minyak dunia menjadi 25 US \$ dollar (Grammas 1991).

Jurnal tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu membahas tentang kontribusi Irak terhadap persetujuan berlakunya sebuah regulasi pemangkasan jumlah kuota produksi yang dibuat oleh OPEC demi menjaga kestabilan harga minyak dunia dan kestabilan jumlah pasokan minyak bagi dunia internasional. Dalam hal ini, Irak telah banyak berkontribusi terhadap sebuah regulasi yang ditetapkan oleh OPEC meskipun Irak harus menghadapi permasalahan. Perbedaan Jurnal tersebut dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis yaitu penulis membahas tentang kepatuhan Irak terhadap regulasi OPEC yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Irak.

Jurnal ketiga yang ditulis oleh Ralph B.Lake dan David R. Reitsema dengan judul *The Iraqi Nationalization of the Iraq Petroleum Company: Implications for the International Law of Expropriation*. Jurnal ini membahas tentang keputusan pemerintah Irak untuk menasionalisasikan perusahaan asing yang melakukan kegiatan pengambilan minyak di wilayahnya dan menasionalisasikan jalur pipa minyak yang menghubungkan Irak dengan negara di wilayah Mediterania yang ditetapkan pada tanggal 1 Juni 1972. Pembuatan kebijakan tersebut memiliki tujuan untuk kepentingan nasional Irak. Kepentingan Nasional utama Irak adalah memajukan perekonomian negaranya. Akan tetapi, dengan adanya keputusan tersebut, Irak harus menghadapi masalah dengan perusahaan asing yang berinvestasi di negaranya. Permasalahan tersebut, yaitu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Irak ditetapkan pada saat terjadinya konflik antara negara Eropa dan Amerika Serikat yang ingin menguasai sumber minyak di Irak pada tahun 1914-1918. Selain itu, permasalahan lainnya adalah pembagian keuntungan antara Irak dengan perusahaan asing yang mengambil minyak di wilayahnya yang menyebabkan kerugian bagi Irak. Irak harus memotong jumlah kuota produksi minyak hingga sekitar 50% dengan syarat harus menurunkan harga minyak sekitar

35%. Dengan adanya permasalahan tersebut, keputusan Irak berlawanan dengan ketentuan hukum internasional. Oleh karena itu, keputusan Irak untuk menasionalisasikan perusahaan minyak harus dipertimbangkan kembali oleh Irak agar tidak berlawanan dengan Hukum Internasional yang menjadi sumber hukum bagi seluruh negara di dunia (Lake and Reitsema 1972).

Jurnal tersebut mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis yaitu membahas tentang kepentingan Irak untuk tetap menerapkan kepentingan nasional negaranya, meskipun Irak harus menghadapi konsekuensi. Tujuan Irak membuat kebijakan tersebut adalah untuk mengendalikan jumlah pasokan minyak di negaranya untuk dapat meningkatkan pendapatan negaranya melalui perdagangan minyak di pasar internasional. Kemudian, perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis yaitu, penulis ingin membahas kebijakan dalam negeri yang dibuat oleh Irak setelah mematuhi regulasi OPEC tahun 2020 yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional Irak, serta menganalisis proses persetujuan Irak terhadap regulasi tersebut.

1.6 Kerangka Pemikiran

Keputusan Irak untuk mematuhi regulasi OPEC tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 terkait pengurangan jumlah kuota produksi bagi seluruh negara produsen minyak, menyebabkan Irak harus mempersiapkan dan membuat kebijakan dalam negerinya. Hal tersebut disebabkan oleh kepatuhan Irak terhadap regulasi OPEC 2020 yang berpengaruh terhadap keberlangsungan kepentingan Nasional Irak. Keputusan yang diambil oleh suatu negara memiliki pengaruh yang besar terhadap kepentingan dan perilaku negara tersebut di dunia internasional. Dengan adanya keputusan Irak tersebut, penulis ingin menganalisis proses Irak mematuhi regulasi OPEC tahun 2020, serta proses pengambilan keputusan Irak untuk membuat kebijakan dalam negeri Irak yang diputuskan oleh Perdana Menteri Mustafa Alkadhimi yang digunakan untuk merespon regulasi OPEC tentang pengurangan jumlah kuota produksi minyak pada tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap kondisi dalam negeri, terutama di bidang ekonomi dengan menggunakan teori *Bureaucratic Politics Models* yang dikemukakan oleh Graham T. Allison.

Teori *Bureaucratic Politics Models* menjelaskan tentang suatu bentuk keputusan politik luar negeri suatu negara yang dilakukan dengan cara birokrasi antar aktor negara dan aktor non negara yang memiliki kepentingan di dalam negara tersebut. Selain itu, teori *Bureacratic Politics Models* juga menjelaskan tentang bentuk pengambilan keputusan politik dalam negeri yang digunakan untuk merespon suatu pengaruh kebijakan organisasi internasional dan rezim internasional yang berpengaruh terhadap kondisi di berbagai bidang di negara tersebut yang dilakukan oleh aktor negara maupun aktor non negara yang memiliki kepentingan di negara tersebut. Hasil bentuk argumentasi aktor negara maupun aktor internasional yang memiliki kepentingan di dalam negara tersebut dapat mempengaruhi suatu bentuk keputusan politik luar negeri maupun politik dalam negeri. Dalam hal ini, suatu bentuk *Decision Making* negara dapat menentukan arah kebijakan politik luar negeri maupun politik dalam negeri suatu negara dengan adanya proses *bargaining* atau tawar menawar pendapat antara aktor negara dan aktor internasional di dalam menentukan sebuah keputusan (Allison and Halperin 1972).

Di dalam penjelasan teori *Bureaucratic Politics* terdapat beberapa variabel yang dapat mempengaruhi suatu keputusan politik dalam negeri Irak yang digunakan untuk menanggapi penerapan regulasi OPEC pada tahun 2020, diantaranya:

a. *Player in Position*

Dalam hal ini, *Player in Position* memiliki peran suatu pemimpin negara yang menjadi aktor individu dalam menentukan sebuah keputusan politik luar negeri dan politik dalam negeri yang dibuat untuk menanggapi sebuah keputusan dan regulasi yang ditetapkan oleh organisasi internasional maupun rezim internasional yang terbagi menjadi *Chief, Staff, Indians*, dan *Ad Hoc*s.

b. *Parochial Priorities, Perception and Issues*

Variable ini menjelaskan tentang perbedaan setiap pemikiran aktor negara yang memiliki peran terhadap sebuah keputusan politik luar negeri maupun politik dalam negeri suatu negara. Dalam hal ini, kekuatan setiap aktor negara memiliki keterbatasan kekuatan di dalam menentukan keputusan

politik luar negeri maupun politik dalam negeri. Oleh karena itu, keterbatasan kekuatan aktor negara tersebut dapat dilihat dari proses tawar-menawar atau birokrasi dari setiap aktor negara tersebut.

c. Interest Stakes and Power

Setiap aktor negara memiliki perbedaan pemikiran di dalam menentukan sebuah keputusan politik luar negeri maupun politik dalam negeri. Dalam hal ini, meskipun setiap aktor negara memiliki pemikiran yang berbeda dalam menentukan sebuah keputusan, tujuan sebuah kebijakan politik luar negeri maupun politik dalam negeri tetap menjadi prioritas utama bagi setiap aktor negara. Oleh karena itu, Perdana Menteri Irak merupakan kekuatan utama yang digunakan untuk menentukan kebijakan politik luar negeri maupun politik dalam negeri negara tersebut.

d. The Problems and The Problems

Permasalahan yang muncul di dalam kebijakan politik luar negeri maupun politik dalam negeri, dapat menjadi faktor terhambatnya pengambilan keputusan kebijakan politik di negara tersebut. Dalam hal ini, setiap permasalahan yang muncul di dalam menentukan kebijakan politik suatu negara menjadi tanggungjawab bagi setiap aktor pemain yang berasal dari anggota legislatif untuk diselesaikan di dalam parlemen agar tidak menghambat kepentingan nasional dari negara tersebut.

e. Action and Channels

Dalam proses birokrasi yang dilakukan oleh aktor negara, setiap aktor negara memiliki pemikiran dan kepentingan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan politik suatu negara. Dengan adanya hal tersebut, setiap aktor negara berusaha untuk mencari dukungan dari pihak swasta atau pihak diluar lingkungan pemerintah agar dapat menjadi kekuatan bagi aktor negara tersebut di dalam parlemen.

f. Actions as Politics

Dalam menentukan sebuah keputusan kebijakan politik luar negeri maupun politik dalam negeri, keputusan pemimpin negara memiliki peran yang besar di dalam memutuskan sebuah rencana dan arah kebijakan politik luar negeri maupun politik dalam negeri sebuah negara. Dalam hal ini, *Actions*

as Politics kebijakan politik dalam negeri negeri yang digunakan Irak untuk merespon regulasi OPEC tahun 2020 adalah Perdana Menteri Irak yang memiliki kekuasaan penuh dalam menentukan arah kebijakan politik dalam negeri Irak yang digunakan untuk merespon berlakunya regulasi OPEC tahun 2020 bagi seluruh negara produsen minyak di dunia.

g. *Streams of Outcome*

Dalam teori *Bureaucratic Politics* atau teori Birokrasi, sebuah kebijakan politik luar negeri maupun kebijakan politik dalam negeri sebuah negara diputuskan dengan melalui proses *bargaining* atau tawar menawar antar sesama aktor negara yang memiliki kepentingan terhadap negara tersebut. Akan tetapi, kepentingan sebuah negara dan penyelesaian sebuah permasalahan merupakan tujuan utama dari adanya proses birokrasi yang dilakukan oleh aktor negara yang terlibat tersebut (Allison and Halperin 1972).

Dengan adanya beberapa variabel diatas, dapat mempengaruhi suatu bentuk keputusan negara dalam menentukan kebijakan politik luar negeri, atau kebijakan dalam negeri yang digunakan untuk merespon berlakunya suatu regulasi yang dibuat oleh organisasi internasional dan rezim internasional yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional suatu negara. Penulis akan menggunakan teori *Bureaucratic Politics Models* yang dikemukakan oleh Graham T. Allison dalam menganalisis proses keputusan Irak mematuhi regulasi pemangkasan jumlah kuota produksi yang dibuat oleh OPEC pada tahun 2020 di masa pandemi Covid-19, serta menganalisis kebijakan dalam negeri Irak yang dibuat setelah Irak berkomitmen untuk patuh dengan regulasi OPEC tersebut. Dalam hal ini, proses *bargaining* atau tawar menawar terjadi pada saat *Decision Making* yang dilakukan oleh kabinet pemerintahan Irak dalam menentukan sebuah keputusan. Proses *bargaining* yang dilakukan oleh anggota kabinet pemerintah Irak dilakukan melalui proses parlementer.

1.7 Argumen Sementara

Irak merupakan salah satu negara anggota dan pendiri OPEC (*Organization of The Petroleum Exporting Countries*). Pada tahun 2020, OPEC membuat sebuah

regulasi tentang pengurangan jumlah kuota produksi minyak di masa pandemi Covid-19 yang bertujuan untuk menstabilkan harga minyak dunia, serta mengendalikan jumlah pasokan minyak bagi dunia internasional di masa pandemi Covid-19. Dalam hal ini, penerapan regulasi OPEC pada tahun 2020 membuat Irak merasa keberatan untuk mematuhi regulasi tersebut. Hal tersebut terjadi akibat industri minyak merupakan sumber utama Irak untuk meningkatkan perekonomian negaranya melalui kegiatan industri dan perdagangan minyak. Dengan demikian, meskipun Irak merasa keberatan untuk mematuhi regulasi OPEC tahun 2020 tersebut, Irak tetap berkomitmen untuk mematuhi regulasi OPEC tahun 2020. Dalam hal ini, Irak membuat keputusan membuat kebijakan dalam negeri yang digunakan untuk melaksanakan kepentingan Nasional negaranya setelah mematuhi regulasi tersebut. Pada tahun 2020 juga merupakan tahun terberat bagi Irak untuk merevolusi sistem pemerintahan negaranya, demi kemajuan di berbagai bidang. Oleh karena itu, dengan kepatuhan Irak terhadap regulasi OPEC tahun 2020 menjadi tantangan besar bagi perdagangan Irak yang mengandalkan industri minyak sebagai sumber utama pendapatan negara yang digunakan memajukan perekonomian negara.

1.8 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, bersumber dari karya ilmiah, jurnal ilmiah, dan buku. Kemudian, sumber data yang telah dituliskan oleh penulis dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil oleh penulis adalah penelitian kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif memiliki konsep yaitu sebuah hasil analisis data yang bersumber dari hasil observasi penulis terhadap jurnal ilmiah, buku, dan karya tulis ilmiah (Creswell and Creswell 2018). Kemudian, penulis akan mengumpulkan hasil data terkait sejarah, peristiwa, dan organisasi internasional yang berkaitan dengan Irak dan OPEC.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini yaitu Irak dan objek dari penelitian ini adalah pengaruh regulasi OPEC pada tahun 2020 terhadap kebijakan domestik dan luar negeri Irak, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam metode hasil pengumpulan data ini, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah. Kemudian, metode observasi dipilih penulis untuk melakukan pencarian data yang digunakan di dalam penelitian ini.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian ini dilakukan penulis dengan melakukan pencarian data melalui media internet dan buku secara daring. Kemudian, setelah penulis mendapatkan hasil data yang diinginkan, penulis akan memasukkan hasil pencarian data tersebut kedalam penelitian ini.

1.9 Sistematika Pembahasan

Berikut isi rangkuman sistematis dari seluruh isi proposal ini, diantaranya :

BAB I: Pendahuluan

Pada bab I ini berisikan tentang latar belakang yang membahas tentang pentingnya peran suatu kebijakan dalam negeri dalam menanggapi suatu regulasi dan peraturan yang berasal dari organisasi dan rezim internasional yang diterapkan di negaranya.

BAB II: Respon IRAK Terhadap Regulasi OPEC Tentang Pengurangan Jumlah Kuota Produksi Minyak Tahun 2020

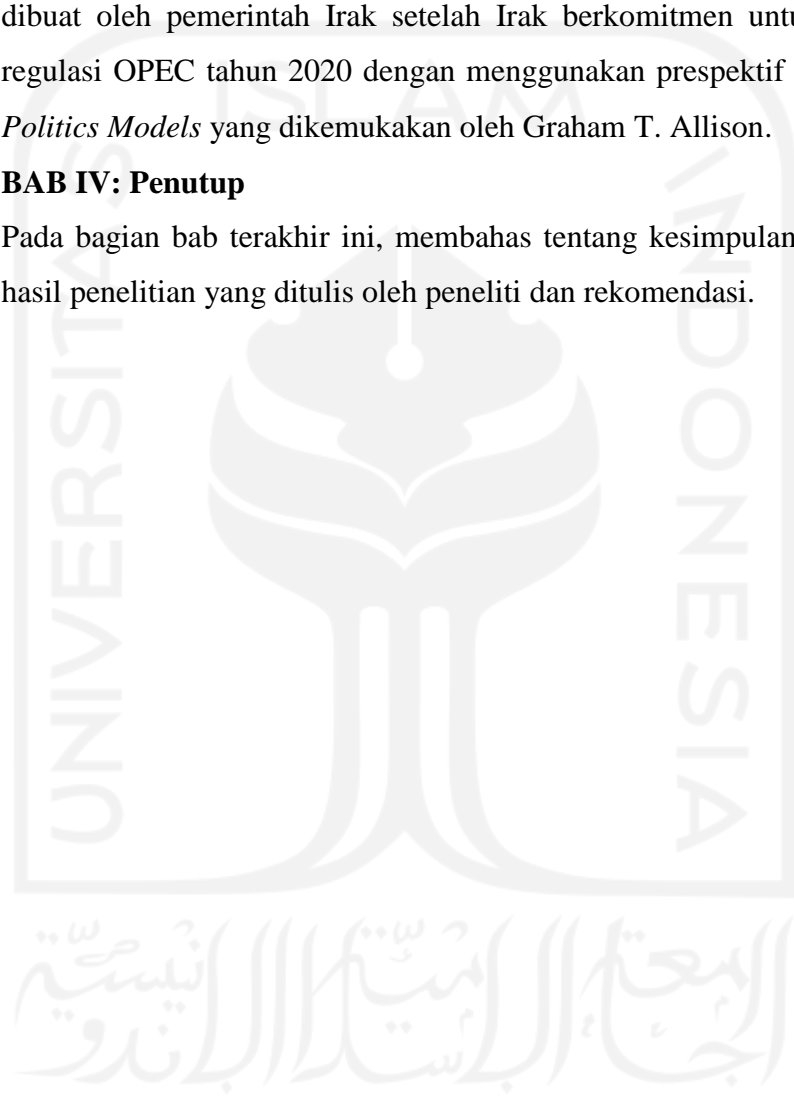
Pada bab II ini menjelaskan tentang hubungan keanggotaan Irak di dalam OPEC dan proses persetujuan Irak terhadap berlakunya regulasi pemotongan jumlah kuota produksi minyak yang dibuat oleh OPEC, serta menjelaskan respon dan dampak yang harus dihadapi oleh Irak setelah menyetujui berlakunya regulasi pemotongan jumlah kuota produksi minyak pada tahun 2020 di masa pandemi Covid-19.

BAB III: Analisis *Bureaucratic Politics Models* Irak Dalam Keputusannya Mematuhi Regulasi OPEC Tahun 2020

Pada bab III ini menjelaskan tentang proses *Decision Making* Irak untuk berkomitmen dan mematuhi regulasi pemotongan jumlah kuota produksi minyak pada tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 yang dibuat oleh OPEC, serta menjelaskan respon dan kebijakan dalam negeri Irak yang dibuat oleh pemerintah Irak setelah Irak berkomitmen untuk mematuhi regulasi OPEC tahun 2020 dengan menggunakan prespektif *Bureaucratic Politics Models* yang dikemukakan oleh Graham T. Allison.

BAB IV: Penutup

Pada bagian bab terakhir ini, membahas tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang ditulis oleh peneliti dan rekomendasi.



BAB II

RESPON IRAK TERHADAP REGULASI OPEC TENTANG PENGURANGAN JUMLAH KUOTA PRODUKSI MINYAK TAHUN 2020

2.1 Hubungan Irak dan OPEC

Irak merupakan salah satu anggota OPEC (*Organization of The Petroleum Exporting Countries*) yang bergabung sejak awal berdirinya OPEC pada tanggal 14 September 1960 dan Irak merupakan salah satu negara pelopor berdirinya OPEC. Hubungan keanggotaan dan kerjasama Irak dengan OPEC terus mengalami perkembangan sejak berdirinya organisasi tersebut hingga pada masa sekarang. Perkembangan hubungan keanggotaan dan kerjasama Irak dengan OPEC tersebut dapat dilihat dengan adanya berbagai macam bentuk kesepakatan yang telah dibuat, kontribusi Irak terhadap setiap regulasi yang telah ditetapkan oleh OPEC, dan hubungan kerjasama Irak dengan negara anggota OPEC maupun negara non anggota OPEC. Hubungan keanggotaan Irak dengan OPEC sendiri berjalan dengan adanya pengaruh dari kebebasan suatu negara untuk bergabung dengan setiap organisasi dan rezim internasional yang ada di dalam sistem politik internasional (Organization of Petroleum Exporting Countries 2022).

Hubungan Irak dengan OPEC sudah terbentuk sejak lama semenjak berdirinya organisasi internasional tersebut, dalam hal ini perkembangan OPEC di dunia internasional tidak lepas dari peran Irak yang memberikan dukungannya terhadap setiap regulasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh OPEC. Hal tersebut dapat terjadi ketika OPEC yang telah menjadi organisasi internasional resmi yang beranggotakan negara-negara produsen minyak. Peran OPEC bagi negara produsen minyak memiliki peran yang besar, termasuk Irak. Kekuatan OPEC di dunia internasional memiliki kekuatan yang besar dengan adanya kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh organisasi internasional tersebut. Peran OPEC terhadap industri minyak Irak memiliki pengaruh yang besar dalam menyelesaikan permasalahan minyak Irak seperti, nasionalisasi industri minyak Irak pada tahun 1972 dan penyelesaian kasus invasi Irak ke Kuwait pada tahun 1990 yang berpengaruh terhadap industri minyak (Colgan 2014).

Kemudian, hubungan Irak dan OPEC dapat dilihat dari komitmen Irak terhadap setiap regulasi dan kebijakan OPEC yang diterapkan di bidang industri minyak internasional. Dalam sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah Irak untuk tetap mengikuti regulasi OPEC pada tahun 2020 tentang pengurangan jumlah kuota produksi minyak di masa pandemi Covid-19, Irak tetap mematuhi penerapan regulasi tersebut meskipun kondisi ekonomi dan perdagangan minyak Irak yang mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri perminyakan Irak Ihsan Ismail. Tujuan Irak tetap mematuhi regulasi tersebut adalah Irak memiliki peran penting terhadap kestabilan harga minyak di pasar internasional, serta Irak berusaha untuk berkomitmen penuh terhadap OPEC dan G20 (Government of Iraq 2020).

Hubungan Irak dengan OPEC sudah terbentuk sejak lama semenjak berdirinya organisasi internasional tersebut, dalam hal ini perkembangan OPEC di dunia internasional tidak lepas dari peran Irak yang memberikan dukungannya terhadap setiap regulasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh OPEC. Hal tersebut dapat terjadi ketika OPEC yang telah menjadi organisasi internasional resmi yang beranggotakan negara-negara produsen minyak. Peran OPEC bagi negara produsen minyak memiliki peran yang besar, termasuk Irak. Kekuatan OPEC di dunia internasional memiliki kekuatan yang besar dengan adanya kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh organisasi internasional tersebut. Peran OPEC terhadap industri minyak Irak memiliki pengaruh yang besar dalam menyelesaikan permasalahan minyak Irak seperti, nasionalisasi industri minyak Irak pada tahun 1972 dan penyelesaian kasus invasi Irak ke Kuwait pada tahun 1990 yang berpengaruh terhadap industri minyak (Colgan 2014).

Kemudian, hubungan Irak dan OPEC dapat dilihat dari komitmen Irak terhadap setiap regulasi dan kebijakan OPEC yang diterapkan di bidang industri minyak internasional. Dalam sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah Irak untuk tetap mengikuti regulasi OPEC pada tahun 2020 tentang pengurangan jumlah kuota produksi minyak di masa pandemi Covid-19, Irak tetap mematuhi penerapan regulasi tersebut meskipun kondisi ekonomi dan perdagangan minyak Irak yang mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri perminyakan Irak Ihsan Ismail. Tujuan Irak tetap

mematuhi regulasi tersebut adalah Irak memiliki peran penting terhadap kestabilan harga minyak di pasar internasional, serta Irak berusaha untuk berkomitmen penuh terhadap OPEC dan G20 (Government of Iraq 2020).

Selain itu, perkembangan hubungan Irak dengan OPEC terus mengalami perkembangan. Keharmonisan hubungan Irak dengan OPEC dapat dilihat dengan Irak menjadi lokasi pertemuan penting antara negara anggota OPEC maupun negara non-anggota OPEC yang diselenggarakan pada tanggal 19 Juni 2022. Hal tersebut dibuktikan dengan perayaan 60 tahun berdirinya OPEC yang diselenggarakan di kota Baghdad, Irak. Selain Irak menjadi lokasi perayaan 60 tahun berdirinya OPEC, Menteri perminyakan Irak Abdul Jabbar Ismael juga menjadi ketua delegasi dalam pertemuan OPEC tersebut. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Menteri perminyakan Irak Abdul Jabbar Ismael menjelaskan bahwa, “Irak bangga telah menjadi bagian dari negara pelopor berdirinya OPEC serta Irak telah menjadi lokasi lahirnya organisasi tersebut”. Kemudian, Irak terus memberikan dukungan terhadap setiap bentuk strategi yang dibuat oleh OPEC dengan tujuan untuk menstabilkan pasar minyak internasional. Hal tersebut dibuktikan dengan penandatanganan Deklarasi kerjasama antara OPEC dengan 10 negara produsen minyak non-anggota OPEC pada tanggal 10 Desember 2016. Kemudian, kontribusi lain Irak di dalam mendukung program kerja OPEC adalah peran penting Irak untuk meresmikan Piagam Kerjasama yang diselenggarakan pada saat berlangsungnya pertemuan ke-6 antara Perdana Menteri OPEC dengan Perdana Menteri non-anggota OPEC yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2019 yang dibuktikan dengan keberhasilan Irak sebagai negara pertama yang meresmikan Piagam Kerjasama antara negara anggota OPEC dengan negara non-anggota OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries 2022).

2.2 Irak menyetujui regulasi OPEC tahun 2020

OPEC dan OPEC+ mulai mengusulkan regulasi tentang pengurangan jumlah kapasitas produksi minyak menjadi 1,5 juta barel per hari bagi seluruh negara produsen minyak pada tahun 2020 yang sudah direncanakan sejak tanggal 5 Maret 2020. Kemudian, pada bulan April 2020, OPEC dan OPEC+ telah resmi membuat regulasi dan kebijakan untuk mengurangi kapasitas produksi minyak di

masa pandemi Covid-19 menjadi 9,7 juta barel perhari yang diterapkan pada bulan Mei dan Juni. Rencana OPEC dan OPEC + untuk membuat regulasi pemotongan jumlah kuota produksi minyak bagi seluruh negara produsen minyak diseluruh dunia ditetapkan dengan tujuan untuk mengendalikan jumlah pasokan dan harga minyak dunia. Dengan adanya rencana pemotongan jumlah kuota produksi minyak bagi negara produsen minyak yang ditetapkan oleh OPEC, Irak harus banyak menghadapi permasalahan. Permasalahan yang dihadapi Irak diantaranya, turunnya perekonomian negara yang disebabkan oleh berkurangnya pendapatan ekspor minyak yang disebabkan oleh regulasi pembatasan jumlah kuota produksi minyak yang dibuat oleh OPEC. Dengan adanya hal tersebut, menyebabkan pemerintah Irak harus menanggung biaya gaji dan biaya jaminan pensiun bagi masyarakat yang bekerja di bidang industri dan instansi pemerintahan (Husein 2021).

Persetujuan Irak untuk menerapkan regulasi OPEC pada tahun 2020 dimulai sejak kuartal kedua setelah regulasi tersebut diterapkan oleh OPEC tepatnya di bulan Mei, yang berlanjut hingga bulan Desember tahun 2020. Industri minyak merupakan komoditas utama bagi Irak untuk meningkatkan PDB negara harus menjadi fokus utama bagi pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi negara. Kepatuhan Irak terhadap setiap regulasi dan kebijakan yang dibuat oleh OPEC merupakan tanggungjawab dan kewajiban Irak sebagai negara pencetus berdirinya OPEC, meskipun Irak harus menghadapi resiko yang besar. Salah satu resiko yang dihadapi oleh Irak yaitu, Irak tetap harus mematuhi perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat dengan perusahaan minyak internasional (IOC) Perjanjian Irak dengan (IOC) adalah kontrak bagi hasil perdagangan minyak di pasar internasional. Selain itu, kerjasama (IOC) dengan Irak memiliki tujuan, yaitu: untuk memenuhi target produksi minyak yang ditetapkan oleh Irak, memberikan hak kepada (IOC) untuk melakukan pengeboran minyak di wilayahnya, dan kerjasama untuk meningkatkan kapasitas produksi minyak. Dengan adanya rencana regulasi pengurangan jumlah kuota produksi minyak yang dilakukan oleh OPEC yang sudah direncanakan sejak awal bulan Maret, Irak beserta negara produsen minyak lainnya baru menyetujui berlakunya regulasi tersebut pada bulan Mei. Pengurangan jumlah kuota produksi minyak yang dilakukan oleh Irak sebesar 1,06

juta barel per hari pada bulan Mei, serta pada bulan Juni sekitar 3,592 juta barel per hari yang sebelumnya 4,653 juta barel per hari (Council on Foreign Relations 2020).

2.3 Dampak yang Dihadapi oleh Irak Akibat Adanya Penerapan Regulasi OPEC Tahun 2020

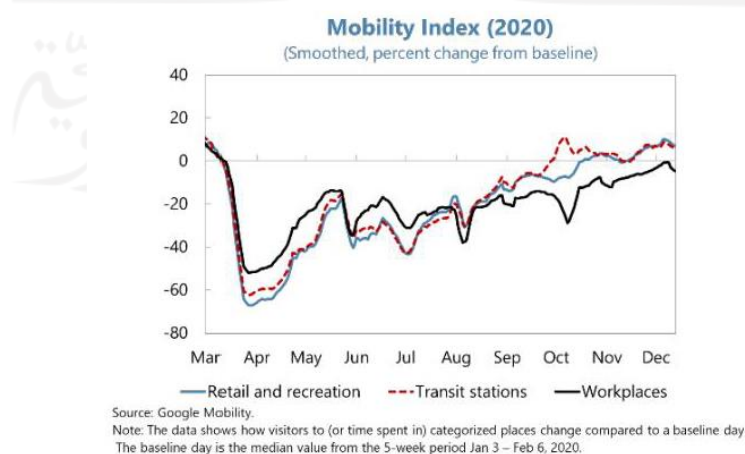
a. Ekonomi

Pada masa awal terjadinya pandemi Covid-19, pasar minyak internasional mengalami penurunan harga akibat penawaran dan permintaan minyak yang tidak seimbang antara negara produsen dengan negara konsumen. Penurunan jumlah kuota produksi minyak sebesar 9,7 juta barel terjadi pada bulan Mei-Juni, kemudian kebijakan pemangkasan jumlah kuota minyak berlanjut hingga pada bulan Juli-Desember 7,7 juta barel (VOA 2020). Kondisi dunia internasional yang terus mengalami krisis di berbagai bidang seperti ekonomi, kesehatan, perdagangan, dan lain sebagainya menyebabkan banyak negara yang harus mempersiapkan strategi dalam menghadapi dampak dari adanya pandemi Covid-19, termasuk Irak. Dalam hal ini, OPEC yang merupakan organisasi internasional yang mengatur jumlah ketersediaan minyak bagi dunia internasional dan mengatur harga minyak di pasar internasional juga harus menghadapi dampak dari pandemi Covid-19 tersebut. Untuk menghadapi kondisi tersebut, OPEC dan OPEC + membuat regulasi tentang pengurangan jumlah kuota produksi minyak bagi negara anggota dan non anggota OPEC yang memiliki tujuan untuk mengendalikan harga minyak dan mengendalikan jumlah pasokan minyak dunia. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya regulasi OPEC pada tahun 2020 tentang pengurangan jumlah kuota produksi minyak bagi negara produsen minyak, diantaranya, adanya konflik antara negara anggota OPEC, kondisi permintaan minyak di pasar internasional yang turun, adanya persaingan pencapaian jumlah kuota produksi antara sesama negara produsen minyak, dan adanya penurunan di bidang ekonomi dan perdagangan minyak internasional akibat pandemi Covid-19 (Martin 2022).

Selain itu, Irak merupakan negara yang menempati urutan ke-2 sebagai negara produsen minyak terbesar di dunia. Industri minyak Irak menyumbang sekitar 4,5 Juta (BPD) *Barrel Per Day*. Industri minyak memberikan keuntungan bagi Irak sebesar 100% PDB pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 industri minyak

Irak memberikan keuntungan sekitar 43%. Pada tahun 2020, terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan harga minyak dunia turun sekitar 35%. Dan dengan adanya regulasi OPEC pada tahun 2020, PDB Irak turun menjadi 16% (Nakle 2021).

Setelah Irak menyetujui berlakunya regulasi OPEC pada tahun 2020 tentang pengurangan jumlah kuota produksi minyak bagi negara anggota dan negara non anggota OPEC, Irak harus banyak menghadapi permasalahan akibat adanya penerapan regulasi tersebut. Dengan adanya kondisi melemahnya ekonomi dan perdagangan internasional yang melemah akibat adanya pandemi Covid-19, menyebabkan Irak harus mengalami krisis ekonomi dan perdagangan. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan Irak mengalami penurunan di bidang industri minyak disebabkan oleh adanya konflik antara Rusia dan Arab Saudi sehingga menyebabkan harga minyak turun sekitar 50% (Alnasrawi, Abed and Muslim 2020). Industri minyak merupakan sektor utama bagi Irak yang digunakan untuk meningkatkan PDB dan ekonomi, serta menjadi sumber utama perdagangan Irak melalui kegiatan ekspor minyak di pasar internasional. Penurunan PDB Irak yang bersumber dari kegiatan ekspor minyak mengalami penurunan sekitar 11%. Dalam hal ini, terdapat laporan perkembangan ekonomi Irak di masa pandemi Covid-19 yang terdapat di dalam hasil laporan *International Monetary Fund* (IMF). Laporan *International Monetary Fund* (IMF) berisikan tentang laporan keuangan dan strategi ekonomi berkelanjutan di masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan pinjaman dari IMF (International Monetary Fund 2021).



Gambar 3. 1 Laporan International Monetary Fund (IMF)

Rencana Irak untuk menambah hutang negara kepada IMF memiliki tujuan untuk menstabilkan ekonomi negara akibat adanya pandemi Covid-19 dan persetujuan Irak terhadap regulasi OPEC tentang pengurangan jumlah kuota produksi minyak di masa pandemi Covid-19 serta menurunnya kegiatan ekspor minyak Irak di pasar internasional akibat permintaan minyak di pasar internasional yang menurun. Laporan tersebut adalah konsultasi pasal IV 2020 antara Dewan Eksekutif IMF dengan Irak, dan laporan tersebut berisikan hasil data keuangan Irak selama pandemi Covid-19. Setelah adanya tinjauan dan konsultasi dari dewan eksekutif IMF terhadap Irak, dewan eksekutif IMF memberikan saran kepada Irak untuk dapat menghadapi permasalahan ini. Saran tersebut berisikan tentang beberapa bentuk kebijakan yang dapat diterapkan oleh Irak. Kebijakan tersebut diantaranya, kebijakan reformasi Fiskal yang bertujuan untuk menjaga perekonomian negara dan untuk strategi keberlanjutan utang kepada IMF dan rencana anggaran negara tahun 2021 yang berisikan strategi Irak untuk meningkatkan pendapatan negara melalui industri non-minyak, kebijakan untuk mengurangi subsidi energi tidak terbarukan, dan bantuan dana untuk meningkatkan fasilitas Kesehatan yang digunakan untuk menangani persebaran pandemi Covid-19 (International Monetary Fund 2021).

Kemudian permasalahan lain yang dihadapi oleh Irak akibat adanya penerapan regulasi OPEC untuk mengurangi jumlah kuota produksi minyak di masa pandemi Covid-19, adalah menurunnya nilai saham industri minyak di pasar bursa saham internasional. Dalam hal ini, Irak yang sepenuhnya bergantung kepada industri minyak harus banyak mengalami kerugian. Kerugian tersebut akibat rendahnya harga minyak dunia serta menurunnya minat investasi asing untuk berinvestasi di industri minyak. Menurunnya nilai saham minyak di pasar saham internasional adalah pembatasan aktivitas masyarakat untuk beraktivitas seperti bekerja, bersekolah, dan lain sebagainya menyebabkan kegiatan perindustrian di berbagai bidang menjadi terbatas, termasuk industri minyak. Selain itu, faktor menurunnya pencapaian jumlah kuota produksi bagi negara produsen minyak juga memberikan dampak terhadap menurunnya nilai saham minyak. Dengan adanya permasalahan tersebut, Bank sentral Irak menggunakan sistem lelang Valuta asing dengan mengendalikan nilai tukar saham di pasar Valuta asing. Hal tersebut

merupakan kebijakan yang digunakan untuk mencapai stabilitas kebijakan moneter Irak yang digunakan untuk meningkatkan perekonomian Irak (Asaad 2021).

b. Menghambat perbaikan dan pengembangan jaringan jalur pipa minyak Irak

Dampak Irak mematuhi regulasi pengurangan jumlah kuota produksi minyak yang dibuat oleh OPEC di masa pandemi Covid-19 berdampak terhadap laju pembangunan infrastruktur industri minyak Irak. Pembangunan dan perbaikan jaringan jalur pipa minyak Irak harus mengalami keterlambatan akibat penerapan regulasi OPEC yang berpengaruh terhadap jumlah pasokan minyak di kilang minyak. Industri minyak termasuk komoditas utama perdagangan Irak di pasar internasional. Kepatuhan Irak terhadap regulasi OPEC di masa pandemi Covid-19 menyebabkan Irak harus memangkas anggaran dana yang digunakan untuk pembangunan dan pengembangan proyek di bidang industri minyak. Hal tersebut disebabkan oleh turunnya harga minyak di pasar internasional serta berlakunya regulasi OPEC tersebut menyebabkan keuntungan Irak di bidang ekspor menurun. Oleh karena itu, jaringan jalur pipa minyak sangatlah penting bagi industri minyak dalam mendistribusikan minyak mentah ke pelabuhan dan kilang minyak. Selain itu, Irak juga berencana untuk menambah jumlah kapasitas kilang minyak agar dapat menampung jumlah volume minyak yang lebih besar. Rencana Irak untuk menambah jumlah kapasitas kilang minyak berjumlah sekitar 140.000 barel perhari serta rencana penambahan unit distilasi minyak mentah sekitar 70.000 barel perhari di kilang minyak Basrah (S&P Global Comodity Insight 2022).

c. Menurunkan Jumlah Pencapaian Ekspor dan Produksi Minyak Irak

Irak merupakan salah satu negara di dunia yang termasuk sebagai negara produsen minyak terbesar di dunia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pencapaian jumlah kuota produksi minyak pada tahun 2013 hingga 2019 yang mengalami peningkatan di setiap tahunnya sekitar 1,7 barel per hari. Akan tetapi, pada tahun 2020 merupakan tahun yang tidak baik bagi industri minyak Irak. Hal tersebut disebabkan oleh industri minyak Irak mengalami penurunan jumlah pencapaian kuota produksi minyak sekitar 4,1 juta barel per hari akibat Irak berusaha untuk mematuhi regulasi OPEC dan OPEC+ untuk mengurangi jumlah

kuota produksi minyak di masa pandemi Covid-19. Keputusan Irak untuk mematuhi regulasi OPEC dilaksanakan pada kuartal kedua tahun 2020. Hal tersebut juga didukung dengan situasi dunia internasional yang mengalami kekacauan dan penurunan di berbagai bidang akibat adanya persebaran pandemi Covid-19. Meskipun Irak pernah mengalami penurunan jumlah pencapaian kuota produksi minyak di tahun 2019, pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah pencapaian kuota produksi minyak dengan jumlah sekitar 4,4 juta barel per hari (U.S international Information Administration 2022).

Dampak Irak mematuhi dan menyetujui regulasi OPEC pada tahun 2020 untuk mengurangi jumlah kuota produksi minyak di masa pandemi Covid-19 adalah menurunnya jumlah ekspor minyak Irak di pasar internasional. Jumlah sekitar 2,763 juta barel per hari pada bulan juli (Reuters, Iraq seeks exemption from OPEC export cut deal next year 2020). Kemudian, pendapatan ekspor Irak turun menjadi 45 milliar US dollar di tahun 2020 menurut laporan IMF (*International Monetary Fund*) (U.S international Information Administration 2022). Selain itu, Komitmen Irak terhadap regulasi pemotongan kapasitas kuota produksi minyak yang dibuat oleh OPEC pada tahun 2020 juga membuat Irak harus menghadapi ancaman divestasi yang dilakukan oleh perusahaan minyak internasional. Kementerian perminyakan Irak memiliki tanggungjawab terhadap beberapa produsen minyak yang berasal dari perusahaan minyak tengah/*midland*, perusahaan minyak utara (NOC), perusahaan minyak Dhi Qar, *Basrah Oil Company* (BOC), dan *Missan Oil Company* (MOC). Sementara Itu, perusahaan minyak internasional yang tergabung menjadi *Integrated Operation Center* (IOC) yang bekerja sama layanan teknis *Two Stage Combustion* (TSC). Kerjasama perusahaan minyak internasional (IOC) dengan layanan teknis (TSC) diharapkan dapat menghemat biaya produksi minyak (International Trade Administration 2021).

2.4 Pengaruh Kebijakan White Paper for Economic Reform sebagai Solusi Meningkatkan Ekonomi Negara di Masa Pandemi Covid-19, serta Kepatuhannya Terhadap Regulasi OPEC

Pada tanggal 06 Juni, 2020 Irak hadir dalam pertemuan dengan negara-negara produsen minyak yang diadakan oleh OPEC di Wina, Austria. Pada

pertemuan tersebut, juru bicara kementerian minyak Irak Assem Jihad memberikan pernyataan bahwa Irak tetap menyetujui dan menerapkan regulasi OPEC tentang pengurangan jumlah kuota produksi minyak di tahun 2020 yang dimulai sejak bulan Mei di masa pandemi Covid-19. Dalam pernyataan tersebut, Irak menjelaskan bahwa meskipun kondisi ekonomi dan perdagangan Irak sedang mengalami penurunan, Irak tetap berkomitmen penuh terhadap penerapan regulasi OPEC untuk mengurangi jumlah kuota produksi minyak (Organization of The Petroleum Exporting Countries 2020).

Dengan adanya keputusan Irak untuk tetap berkomitmen untuk patuh terhadap regulasi OPEC tentang pengurangan jumlah kuota produksi minyak pada tahun 2020, Irak harus menerima dan menghadapi konsekuensi dari adanya penerapan regulasi tersebut. Konsekuensi yang dihadapi oleh Irak adalah, Irak harus menghadapi krisis ekonomi dan perdagangan akibat meluasnya persebaran pandemi Covid-19 dan harga minyak dunia yang turun. Untuk menghadapi kondisi krisis ekonomi dan perdagangan akibat adanya pandemi Covid-19 dan komitmen Irak untuk menerapkan regulasi OPEC tahun 2020, Irak membuat sebuah perumusan kebijakan *White Paper for Economic Reform* (WPER). WPER merupakan sebuah bentuk respon dan kebijakan Irak karena mengalami krisis ekonomi dan perdagangan. Dalam hal ini, WPER merupakan solusi Irak yang memiliki tujuan utama untuk mengatasi penurunan ekonomi dan juga mereformasi sistem ekonomi negara. Selain itu, WPER dibuat atas adanya tujuan dari pemerintah Irak untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat dan untuk memajukan perekonomian negara. Rancangan strategi ekonomi Irak dibuat dengan tujuan pertamanya, yaitu untuk membentuk program reformasi dengan melakukan defisit anggaran negara agar terciptanya ruang fiskal dalam pelaksanaan reformasi jangka waktu pendek hingga menengah (3-5 tahun). Kemudian, yang kedua yaitu memperluas sektor ekonomi swasta dan memberikan anggaran dana untuk mengembangkan sektor non-minyak seperti, pariwisata, pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Dalam isi WPER dijelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan ekonomi Irak menurun diantaranya:

- a. Berkurangnya pendapatan Irak yang berasal dari industri minyak akibat harga minyak dunia yang turun.

- b. Sistem pemerintahan yang kurang modern dalam mengelola pendapatan negara.
- c. Lemahnya kekuatan lembaga keuangan negara dalam mengelola keuangan negara.
- d. Meluasnya persebaran pandemi Covid-19 yang berdampak ke berbagai bidang seperti, kesehatan, sosial, Pendidikan, ekonomi, industri, pariwisata, dan menyebabkan aktivitas masyarakat menjadi terbatas.
- e. Sistem perbankan Irak yang kurang modern.
- f. Aksi terorisme yang meningkat, hal tersebut menyebabkan kerusakan pada fasilitas umum milik negara. Hal tersebut menyebabkan pemerintah Irak harus mengeluarkan anggaran dana lebih untuk melawan aksi terorisme tersebut serta memperbaiki fasilitas umum yang hancur akibat aksi terorisme tersebut (Government of Iraq 2020).

Menurut *World Bank* dengan penerapan reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Irak dapat meningkatkan pertumbuhan GDP sebesar 58,4%, akan tetapi *World Bank* juga berpendapat bahwa kemungkinan tersebut dapat terjadi apabila Irak mau keluar dari kerapuhan sistem politik dan ekonomi negaranya. Dalam hal ini, pemerintah Irak telah menyetujui penerapan WPER yang mulai diterapkan pada bulan Oktober tahun 2020 dengan rencana perkembangan kemajuan ekonomi Irak sekitar (3-5 tahun). Pernyataan *World Bank* tersebut didukung dengan melihat kondisi perekonomian Irak pada tahun 2020. Perekonomian Irak pada tahun 2020 yang mengalami penyusutan sekitar 9,5%. Hal tersebut dapat terjadi akibat adanya pembatasan jumlah kuota produksi yang dilakukan oleh OPEC, sehingga menyebabkan pendapatan Irak di bidang industri minyak turun. Kemudian, Faktor lain yang menyebabkan *Gross Domestic Product* (GDP) Irak turun adalah penyusutan GDP pada sektor non-minyak sekitar 9,2% yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Dengan adanya faktor tersebut, menyebabkan pendapatan Irak mengalami penurunan sekitar 47,5% pada 8 bulan pertama di tahun 2020. Meskipun pendapatan Irak mengalami penurunan, pemerintah Irak tetap memiliki kewajiban untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat melalui tagihan dana pensiun dan pertanggungjawaban terhadap upah publik. Kemudian, dengan adanya kewajiban pemerintah Irak untuk mensejahterakan ekonomi

masyarakatnya, pemerintah Irak harus meningkatkan anggaran dana sekitar 25,8% yang berasal dari GDP pada akhir tahun 2020 (The World Bank 2020).

Selain itu, keputusan pemerintah Irak untuk menerapkan kebijakan *White Paper* untuk mereformasi sistem ekonomi negara juga memberikan dampak yang positif di bidang industri gas alam dan minyak Irak. Di bidang industri minyak WPER berperan sebagai pembaruan di dalam pembuatan UU tentang industri minyak yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja produksi minyak. Pembaruan tersebut diantaranya, UU tentang penentuan lokasi dan prosedur pengelolaan kilang minyak, UU tentang perdagangan impor minyak di pasar internasional, pembaruan UU industri minyak yang dilakukan oleh kementerian perminyakan Irak, dan UU yang mengatur kegiatan produksi minyak yang dilakukan oleh perusahaan nasional. Dampak positif lainnya yang dapat memberikan kemajuan di bidang industri minyak adalah peningkatan jaringan transportasi yang digunakan untuk memudahkan pendistribusian produk hasil olahan minyak bumi, gas alam, dan minyak mentah. WPER juga mereformasi jaringan perdagangan ekspor dengan tujuan untuk memperluas infrastruktur ekspor. Pembuatan kebijakan WPER juga digunakan untuk mengendalikan jumlah kuota produksi minyak di masa pandemi Covid-19 agar tetap memberikan keuntungan bagi Irak, setelah Irak mematuhi regulasi OPEC pada tahun 2020 (Ishaq 2021).

Dalam hal ini, WPER memiliki program yang digunakan untuk mereformasi sistem ekonomi Irak dan digunakan untuk memajukan perekonomian negara, diantaranya:

1. Strategi Irak untuk mencapai stabilitas keuangan yang stabil

- a. Mengurangi jumlah defisit negara sekitar 3% dari jumlah awal sekitar 20% yang berasal dari GDP. Kemudian, mengurangi jumlah pengeluaran anggaran dana untuk biaya gaji publik sekitar 25% menjadi 12,5% yang berasal dari anggaran dana federal.
- b. Merubah sistem pengelolaan keuangan negara.
- c. Meningkatkan jumlah pendapatan negara melalui pajak dan Bea cukai.
- d. Mengembalikan dana hasil korupsi, aset negara, dan dana hasil dari pencucian uang yang dilakukan oleh koruptor.
- e. Memantau nilai tukar kurs mata uang Dinar dengan Mata uang kurs Dollar.

- f. Mereformasi dana pensiun yang diberikan oleh pemerintah Irak dengan membatasi masuknya anggaran dana yang berasal dari anggaran Federal.
- g. Meninjau kembali tarif biaya listrik yang berlaku bagi sektor industri dan pemukiman masyarakat, serta menyesuaikannya dengan tarif yang disesuaikan dengan harga bahan bakar minyak di pasar internasional (Government of Iraq 2020).

2. Penerapan reformasi strategis dan menciptakan kesempatan kerja yang berkelanjutan

- a. Modernisasi dan memulihkan sektor keuangan negara agar lebih berkembang.
- b. Modernisasi sistem perbankan Irak dengan meningkatkan pengembangan sistem pada bank pemerintah dan bank swasta. Kemudian, menerapkan sistem *Core banking system* di bank Al-Rafidain dan Rasshed.
- c. Menerapkan sistem perbankan elektronik dengan mengembangkan sistem *e-banking*.
- d. Meningkatkan pendapatan negara melalui pasar komoditas saham dan pasar pertukaran mata uang.
- e. Meningkatkan strategi untuk menambah pendapatan negara melalui industri migas dan pertanian.
- f. Memberikan bantuan anggaran dana terhadap sektor industri swasta dengan memudahkan prosedur permintaan bantuan anggaran dana dan memberikan bentuk bantuan lainnya.
- g. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Irak dan mendukung usaha kecil menengah (UMKM) milik swasta.
- h. Memberikan layanan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat yang terkoneksi dengan perusahaan swasta dengan tujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang berkualitas (Government of Iraq 2020).

3. Meningkatkan infrastruktur dasar

- a. Meningkatkan kemampuan kinerja di sektor listrik.
- b. Meningkatkan layanan jaringan internet kepada masyarakat menjadi (4G). Kemudian, Irak juga ingin meningkatkan layanan jaringan internet menjadi (5G) yang dilaksanakan secara bertahap.

- c. Modernisasi peraturan pada bidang layanan transportasi publik dan meningkatkan minat investor swasta untuk berinvestasi di bidang transportasi publik.
- d. Mengembangkan wilayah khusus zona industri (Government of Iraq 2020).

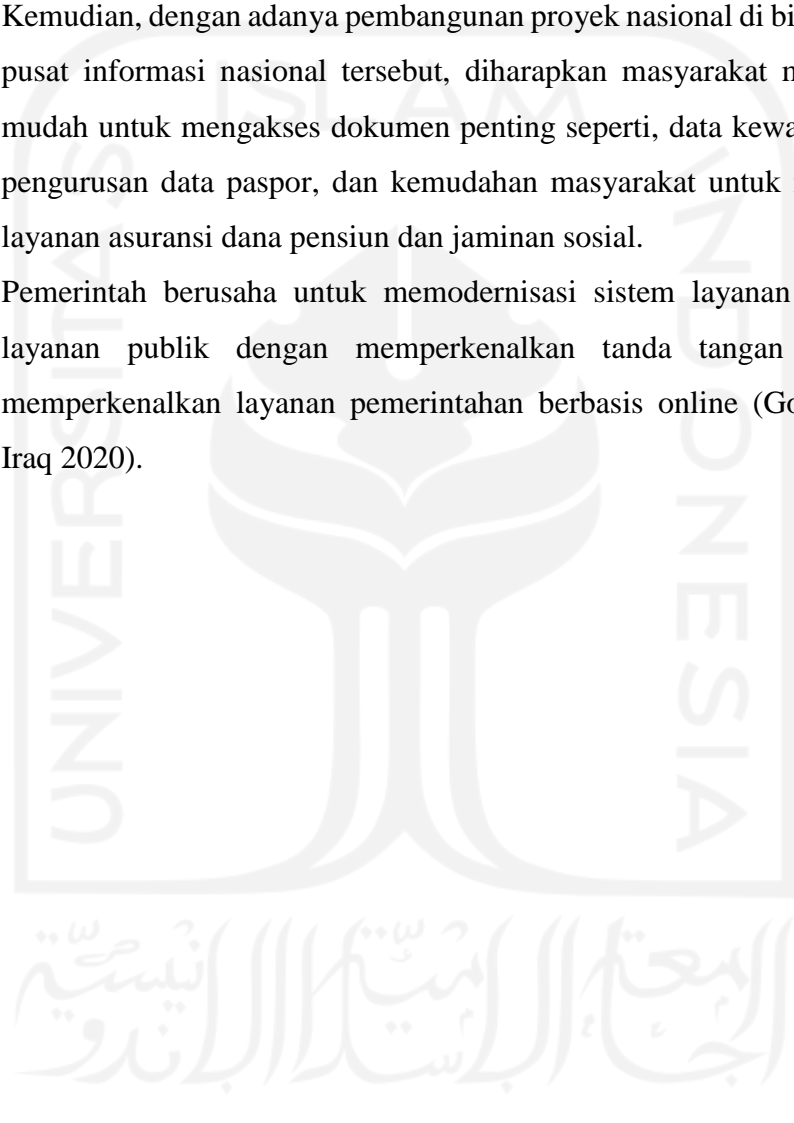
4. Menyediakan layanan dasar dan melindungi kelompok rentan selama dan setelah proses reformasi

- a. Meningkatkan jumlah pasokan air minum bagi masyarakat dan meningkatkan pembangunan saluran irigasi air yang digunakan untuk memudahkan pendistribusian air ke lahan pertanian, selain itu pemerintah berusaha meningkatkan pembangunan saluran sanitasi.
- b. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan pembangunan fasilitas pendidikan dengan mendirikan 1.000 bangunan sekolah.
- c. Mereformasi sistem jaminan sosial bagi masyarakat
- d. Meningkatkan sistem pelayanan terhadap masyarakat yang telah pensiun dengan memberikan bantuan dana dengan menyesuaikan kategori masyarakat tersebut bekerja seperti, swasta, koperasi, publik, dan pemerintahan.
- e. Menyelesaikan rancangan undang-undang (UU) tentang asuransi Kesehatan bagi masyarakat dengan tujuan seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati asuransi Kesehatan tersebut (Government of Iraq 2020).

5. Memperbaiki sistem pemerintahan dan memperkenalkan perubahan pada kerangka hukum untuk memudahkan lembaga internasional dan individu untuk dapat menerapkan reformasi Irak.

- a. Mereformasi dan merubah peraturan pemerintah terkait kerjasama antara organisasi internasional dan negara lain dengan Irak.
- b. Pemerintah berusaha untuk memodernisasi sistem pemerintahannya dengan menggunakan sistem *e-governance* yang digunakan untuk memudahkan pengawasan terhadap masuknya pendapatan negara yang bersumber dari pajak dan bea cukai, serta memudahkan pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga swasta atau internasional yang bekerja sama dengan pemerintah.

- c. Pemerintah melakukan kerjasama dengan organisasi internasional yang digunakan untuk menginvestigasi hasil aset negara yang hilang akibat tindakan korupsi.
- d. Pemerintah berusaha untuk menyelesaikan pembangunan proyek nasional di bidang pusat informasi nasional yang digunakan untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan pemerintahan secara online. Kemudian, dengan adanya pembangunan proyek nasional di bidang layanan pusat informasi nasional tersebut, diharapkan masyarakat menjadi lebih mudah untuk mengakses dokumen penting seperti, data kewarganegaraan, pengurusan data paspor, dan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan layanan asuransi dana pensiun dan jaminan sosial.
- e. Pemerintah berusaha untuk memodernisasi sistem layanan administrasi layanan publik dengan memperkenalkan tanda tangan online dan memperkenalkan layanan pemerintahan berbasis online (Government of Iraq 2020).



BAB III

ANALISIS BUREAUCRATIC POLITICS MODELS IRAK DALAM KEPUTUSANNYA UNTUK MEMATUHI REGULASI OPEC TAHUN 2020

Pada bab III menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan Irak untuk mematuhi regulasi OPEC pada tahun 2020 terkait pengurangan jumlah kuota produksi minyak pada bulan Mei hingga Desember di masa pandemi Covid-19, serta menjelaskan kebijakan politik dalam negeri yang dibuat oleh pemerintah Irak setelah Irak berkomitmen untuk patuh terhadap regulasi OPEC tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan perspektif *Bureaucratic Politics Models*. Situasi pandemi Covid-19 mewajibkan kepada seluruh negara produsen minyak untuk menstabilkan harga minyak di pasar internasional dengan mendukung setiap kebijakan yang dibuat oleh OPEC. Irak yang juga termasuk sebagai salah anggota dari OPEC + berusaha untuk menekankan kepada negara anggota OPEC dan negara non anggota OPEC untuk memberikan kontribusi kepatuhannya terhadap regulasi pengurangan jumlah kuota produksi minyak pada bulan Mei hingga Desember (Morrow 2020). Dalam hal ini, keputusan Irak untuk menyetujui dan mematuhi regulasi OPEC tahun 2020 mendapatkan persetujuan dari Perdana Menteri Irak Mustafa Al-Kadhimi (Davison 2020).

Dalam teori *Bureaucratic Politics* memiliki dua fokus utama dalam menganalisis sebuah keputusan kebijakan politik luar negeri suatu negara. Fokus utama yang pertama adalah berisikan tentang model pengambilan keputusan suatu negara dengan melihat model birokrasi dari negara tersebut. Teori *Bureaucratic Politics Models* memiliki tujuh variabel yang digunakan untuk menentukan sebuah keputusan. Tujuh variabel tersebut terdiri setiap proses birokrasi suatu keputusan negara yang dilihat dari : pembagian aktor pemain yang terlibat dalam penentuan sebuah keputusan yang terbagi sesuai dengan posisinya, yang meliputi : kekuatan dan kepentingan dari aktor pemain tersebut, permasalahan yang akan dibahas oleh aktor pemain tersebut, proses tawar-menawar atau *Bargaining* antara para aktor pemain yang terlibat, tindakan yang diambil oleh aktor pemain tersebut, dan pengambilan hasil keputusan yang disetujui oleh aktor pemain tersebut melalui tindakan politik. Fokus utama kedua dari teori *Bureaucratic Politics* yaitu

melakukan proses *Action* atau aksi, *Niatan*, dan pembagian aktor pemain menjadi kategori *Chief* dan *Indians* setelah adanya proses identifikasi masalah (Allison Graham T 1969).

Dalam proses *Bureaucratic Politics* terdapat beberapa tahapan yang disesuaikan dengan keputusan Irak untuk mematuhi dan menyetujui penerapan regulasi OPEC untuk mengurangi jumlah kuota produksi minyak di bulan Mei hingga Desember di masa pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan politik dalam negeri Irak. Dalam hal ini, menurut Alisson terdapat tahap pembagian tujuh variabel yang digunakan untuk menganalisis keputusan suatu negara. Tujuh variabel tersebut diberi nama *organizing concept* (Allison Graham T 1969).

3.1 Pembagian Posisi Aktor Pemain

Pembagian posisi aktor pemain yang terdapat di dalam teori *Bureaucratic Politics Models* yang dikemukakan oleh Graham T. Alisson meliputi seluruh aktor individu yang berasal dari aktor negara maupun aktor non negara yang terlibat di dalam pengambilan suatu keputusan politik negara. Kemudian, keputusan Irak untuk tetap mematuhi regulasi OPEC pada tahun 2020 tentang pengurangan jumlah kuota produksi minyak di bulan Mei hingga Desember dapat dilihat dari peran dan kekuatan aktor negara maupun aktor non negara yang terlibat di dalam pengambilan keputusan tersebut, dan hal tersebut disesuaikan dengan *Organizing Concepts and Basic Unit of Analysis : Policy as Political Outcome* (Allison Graham T 1969).

Kategori *Chief* merupakan aktor pemain yang memiliki kekuatan tertinggi untuk memutuskan sebuah kebijakan negara. *Chief* di dalam keputusan Irak mematuhi regulasi OPEC tahun 2020 diperankan oleh Perdana Menteri Irak, Menteri keuangan dan Menteri Perminyakan yang terdapat di tabel 1. Kemudian, *Staff* merupakan aktor pemain yang memberikan dukungan terhadap keputusan *Chief* yang berasal dari pejabat institusi pemerintahan dan anggota legislatif yang terdapat di table 2. Sedangkan, *Indians* merupakan aktor pemain yang memberikan penolakan terhadap keputusan *Chief* yang juga berasal dari pejabat institusi pemerintahan dan anggota legislatif. Akan tetapi, Dalam keputusan Irak untuk mematuhi regulasi OPEC pada tahun 2020, tidak memiliki *Indians*. Kemudian

kategori ketiga adalah *Ad Hocs* yang merupakan aktor pemain yang berasal dari luar lingkungan pemerintahan Irak yang terdapat di tabel 3.

Tabel 3. 1 Aktor Pemain yang Termasuk ke dalam kategori *Chief*

No.	<i>Chief</i>	Jabatan
1.	Mustafa Al-Kadhimi	Perdana Menteri Irak periode 7 Mei 2020-28 Oktober 2022
2.	Ihsan Abdul Jabbar Ismail	Menteri Perminyakan Irak
3.	Dr. Alli Allawi	Menteri Keuangan Irak dan Wakil Perdana Menteri Irak

Sumber: (Government of Iraq 2020)

Tabel 3. 2 Aktor Pemain yang Termasuk ke dalam Kategori Staff

No.	Nama Aktor Pemain	Jabatan
1.	Awat Sheikh Janab	Menteri keuangan Irak wilayah Kurdistan (KRG)
2.	Thamir Ghadhban	Menteri Perminyakan Irak periode 25 Oktober 2018-6 Mei 2020

Sumber: (Rudaw 2020)

Tabel 3. 3 Aktor Pemain yang Termasuk ke dalam Kategori Ad Hocs

No.	<i>Ad Hocs</i>	Posisi
1.	Pangeran Abdul Aziz Bin Salman	Menteri Energi Arab Saudi
2.	Hadi Fathallah	Direktur <i>NAMEA Group</i> , konsultan Bank Dunia, dan konsultan <i>The International Fund for Agricultural Development (IFAD)</i> untuk Irak

Sumber: (Kutlu 2020), (Fathallah and Robertson, How the agri-food sector can turn Iraq's economy around 2020)

Dalam teori *Bureaucratic Politics Models* terdapat aktor pemain tambahan yaitu *Ad Hoc*. *Ad Hoc* memiliki peran sebagai *Interest Group* yaitu pihak diluar lingkungan pemerintah negara yang berasal dari aktor individu yang memiliki kepentingan yang berasal dari perusahaan Multinasional atau Nasional, organisasi atau rezim internasional, dan aktor pemain yang berasal dari lingkungan pemerintahan negara lain yang berperan di dalam pengambilan keputusan kebijakan suatu negara.

"Ad Hoc Players": actors in the wider government game (especially "Congressional Influentials"), members of the press, spokesmen for important interest groups (especially the "bipartisan foreign policy establishment" in and out of Congress), and surrogates for each of these groups (Allison Graham T 1969).

Dengan adanya pembagian tabel yang berisikan aktor pemain yang disesuaikan dengan posisi, kekuatan, serta peran dari setiap aktor pemain di dalam penentuan keputusan Irak untuk tetap mematuhi regulasi OPEC pada tahun 2020, dapat digunakan sebagai acuan utama di dalam menentukan posisi aktor pemain yang disesuaikan dengan kepentingan, peran, dan kekuatan di dalam proses birokrasi penentuan keputusan suatu negara (Allison Graham T 1969).

Sesuai dengan pembagian aktor pemain yang terdapat di dalam *Bureaucratic Politics Models*, Setiap aktor pemain yang terlibat di dalam keputusan Irak untuk mematuhi dan menerapkan regulasi pemotongan jumlah kuota produksi minyak pada tahun 2020 di masa pandemi Covid-19, memiliki posisi yang disesuaikan dengan peran dan tugasnya masing-masing. *Chief* memiliki wewenang tertinggi dalam memutuskan suatu kebijakan negara. Sedangkan *Staff* dan *Indians* memiliki tugas dan peran untuk melakukan proses *bargaining* di dalam parlemen. Kemudian, tugas lain dari *Staff* dan *Indians* adalah mengajukan rencana kebijakan politik negara kepada *Chief* untuk diberikan persetujuan. Sedangkan *Ad Hoc* merupakan aktor pemain yang berasal dari luar lingkungan pemerintahan negara yang berasal dari pihak swasta atau pejabat pemerintahan negara lain yang memiliki kepentingan di negara tersebut, dan memiliki hubungan kerjasama dengan *Chief*, *Staff* dan *Indians*.

3.2 Parochial Priorities, Perception, and Issues

Menurut Graham Allison T, di dalam proses *Bureaucratic Politics Models* suatu negara, setiap aktor pemain yang terbagi menjadi kategori *Chief, Indians*, dan *Ad Hocs* memiliki peran dan kontribusi yang disesuaikan dengan kekuatan (*power*) yang dimilikinya. Dalam hal ini, kekuatan yang dimiliki oleh setiap aktor pemain disesuaikan dengan posisi jabatan yang dimiliki oleh aktor pemain tersebut di dalam institusi maupun organisasi yang ditempati oleh aktor pemain tersebut. Selain itu, *Parochial Priorities, Perception, and Issues* yang dimiliki oleh setiap aktor pemain juga dipengaruhi oleh kepentingan dari institusi dan organisasi yang terlibat di dalam keputusan suatu negara. (Allison Graham T 1969).

Meskipun *Chief, Indians*, dan *Ad Hocs* memiliki *Parochial Priorities, Perception, and Issues* yang berbeda-beda didalam proses *Bargaining*, tujuan kepentingan nasional Irak tetap menjadi prioritas bagi setiap aktor pemain. *Chief* di dalam keputusan Irak untuk mematuhi regulasi pemotongan jumlah kuota produksi minyak tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 diperankan oleh Perdana Menteri Mustafa Al-Kadhimi. Mustafa Al-Kadhimi merupakan Perdana Menteri Irak yang ditunjuk oleh Presiden Irak Barham Salim untuk menggantikan kepemimpinan Perdana Menteri Adil Abdul Mahdi yang telah berhenti menjabat sebagai Perdana Menteri Irak sejak 7 Mei 2020 (Loveluck 2020). Kabinet pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Mustafa Al-Kadhimi harus banyak menghadapi tantangan yang berat akibat krisis politik yang terjadi di Irak, dan tuntutan masyarakat untuk merevolusi sistem politik negara (Mansour 2020). Dengan demikian, Mustafa Al-Kadhimi memiliki *Parochial Priorities, Perception and Issues* untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Irak, terutama di bidang politik dan ekonomi. Di bidang ekonomi dan perdagangan, Mustafa Alkadhimi fokus terhadap pengembangan industri minyak. Industri minyak merupakan sektor utama perdagangan Irak dan menjadi sumber pendapatan utama Irak sebesar 95% . Visi dan misi Mustafa Al-kadhimi di bidang industri minyak adalah menjadikan Industri minyak sebagai proyek pembangunan negara. Hal tersebut menjadi fokus kabinet pemerinatahannya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Irak (Releases 2020).

Selain itu, *Chief* lainnya juga diperankan oleh Menteri Perminyakan Irak Ihsan Abdul Jabar Ismail dan Menteri Keuangan Dr. Alli Allawi. Dua aktor pemain tersebut juga memiliki kekuatan tertinggi untuk menentukan keputusan Irak untuk patuh terhadap regulasi OPEC tahun 2020. Menteri Perminyakan Irak berperan penting terhadap stabilitas industri minyak di masa pandemi Covid-19 (Gamal, Aboulenin and Zhdannikov 2020). Dalam hal ini, *White Paper for Economic Reform* (WPER) merupakan kebijakan dalam negeri yang disulkan oleh Menteri Keuangan Dr. Alli Allawi kepada parlemen yang digunakan untuk merevolusi sistem perekonomian negara, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk menyelesaikan masalah perekonomian dalam negeri, untuk menjaga stabilitas ekonomi negara (terutama di masa pandemi Covid-19), serta untuk merespon berlakunya regulasi OPEC tahun 2020 yang berdampak terhadap kondisi perekonomian negara (Shuker 2022).

Kategori kedua adalah *Staff*. Peran *Staff* di dalam keputusan dan pernyataan Irak untuk mematuhi regulasi OPEC adalah aktor pemain yang memberikan persetujuan dan dukungan terhadap keputusan *Chief*. Dalam hal ini, aktor yang termasuk kategori *Staff* adalah Menteri keuangan Irak wilayah *Kurdistan Regional Government* (KRG) Awat Sheikh Janab dan Menteri perminyakan Irak Thamir Ghadhban yang menjabat pada periode 25 Oktober 2018-6 Mei 2020 di masa kepemimpinan Perdana Menteri Adil Abdul Mahdi yang memberikan persetujuan dan dukungannya terhadap pemerintah Irak untuk berkomitmen mematuhi regulasi OPEC tahun 2020 tentang pengurangan jumlah kuota produksi minyak di masa pandemi Covid-19. Hal tersebut disebabkan oleh permintaan minyak di pasar internasional mengalami penurunan dan harga minyak dunia yang turun (Al-Khayat 2022).

Untuk merespon keputusan Irak mematuhi regulasi OPEC tahun 2020, pejabat pemerintah wilayah Kurdistan dan Kurdi, serta pejabat pemerintah wilayah Irak lainnya mengadakan pertemuan Pers yang digunakan untuk membahas kesepakatan antara negara OPEC dengan negara non anggota OPEC untuk menyetujui penerapan regulasi OPEC untuk mengurangi jumlah kuota produksi minyak di masa pandemi Covid-19. Kemudian terdapat pernyataan Menteri Keuangan Irak wilayah Kurdistan Awakh Shikh Janab yaitu, "*We agreed to reduce*

the production of oil based on the OPEC agreement," Kurdistan Regional Government finance minister Awat Shikh Janab said, echoing Ghadhban" (Rudaw 2020). Kemudian, mantan Menteri perminyakan Irak Thamir Ghadban, juga memberikan pernyataannya bahwa , *"As you are all aware, we announced yesterday that Iraq will abide by the measures to reduce its oil production in stages and that is a 23 percent reduction."* (Rudaw 2020). Selain itu, wilayah Kurdistan (KRG) merupakan salah satu wilayah terbesar industri minyak Irak yang mendistribusikan hasil produksi minyak mentahnya ke Turki dengan menggunakan saluran pipa. Dan saluran pipa minyak dari Kurdistan ke Turki memiliki fungsi untuk mendistribusikan minyak mentah ke pasar internasional.

Kategori ketiga yaitu *Indians*. Peran *Indians* di dalam keputusan Irak untuk mematuhi regulasi OPEC tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 adalah memberikan penolakan terhadap keputusan *Chief* dalam mengambil sebuah keputusan kebijakan politik suatu negara. Aktor pemain yang termasuk kategori *Indians* menurut Allison adalah aktor pemain yang berasal dari anggota legislatif yang memberikan argumen penolakan di dalam proses *bargaining* di dalam parlemen yang sesuai dengan konsep *Bureaucratic Politics Models* (Allison Graham T 1969).

Akan tetapi, keputusan Irak untuk mematuhi regulasi pemotongan jumlah kuota produksi minyak pada tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 yang dibuat oleh OPEC tidak terdapat anggota legislatif yang berperan sebagai *Indians*. Faktor yang menyebabkan seluruh anggota parlemen terpaksa menyetujui penerapan regulasi OPEC tahun 2020 yang ditujukan kepada seluruh negara produsen minyak dunia adalah kondisi ekonomi dan politik Irak yang sedang mengalami krisis. Tantangan Irak di bidang industri minyak adalah Irak memiliki perjanjian layanan *Integrated Operation Center* (IOC) dengan perusahaan minyak internasional. Hasil dari perjanjian Irak dengan perusahaan minyak internasional adalah dapat memenuhi kapasitas produksi minyak Irak. Kemudian, krisis politik Irak disebabkan oleh adanya perubahan sistem pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Mustafa Alkadhimi. Selain itu, krisis politik lain yang dihadapi oleh Irak adalah penolakan rencana rancangan anggaran dana Irak pada tahun 2020 yang disebabkan oleh harga minyak dunia yang turun dan Irak kesulitan mendapatkan

pinjaman dari lembaga keuangan akibat penolakan rencana anggaran dana yang ditolak oleh kabinet pemerintah yang baru (Relations 2020).

Kategori keempat adalah *Ad Hoc*s. Peran *Ad Hoc*s di dalam keputusan kebijakan negara adalah memprioritaskan kepentingan pihak pebisnis, institusi atau organisasi, dan negara lain yang berasal dari luar lingkungan pemerintah Irak agar tetap menjalankan kepentingannya di negara tersebut. Pangeran Abdul Aziz Bin Salman yang merupakan Menteri perminyakan Arab Saudi berusaha untuk mendukung keputusan Irak untuk tetap patuh terhadap regulasi pemotongan jumlah kuota produksi yang dibuat oleh OPEC tahun 2020 di masa pandemi Covid-19. Dukungan Menteri perminyakan Arab Saudi Pangeran Abdul Aziz Bin Salman terhadap Irak disampaikan melalui sebuah argumen, yaitu :

“Iraq’s Minister of Oil Ihsan Abdul Jabbar Ismaael confirmed in a phone call with Saudi Arabia’s Energy Minister Prince Abdul Aziz bin Salman his country’s full commitment to the decisions taken by OPEC+ nations last Saturday, according to the statement “ (Kutlu 2020) .

Oleh karena itu, landasan utama Menteri perminyakan Arab Saudi Pangeran Abdul Aziz Bin Salman mendukung Irak untuk mematuhi regulasi OPEC tahun 2020, yaitu untuk menjaga komitmen Irak sebagai negara anggota OPEC terhadap segala bentuk regulasi dan kebijakan yang dibuat oleh OPEC, menjaga hubungan kerjasama di bidang industri minyak dengan Arab Saudi, dan untuk menjaga stabilitas harga minyak dunia. Hal tersebut disampaikan melalui sebuah *statement*, *“These adjustments are in the interest of oil market stability,’ it added”* (Kutlu 2020).

Hadi Fathallah merupakan Direktur *NAMEA Group*, konsultan Bank Dunia, dan konsultan *The International Fund for Agricultural Development* (IFAD) untuk Irak. Dalam hal ini, dengan adanya keputusan Irak untuk berkomitmen terhadap regulasi pemotongan jumlah kuota produksi minyak tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 yang dibuat oleh OPEC , memberikan pengaruh terhadap kemajuan pembangunan pertanian dan keamanan pangan Irak. Pembangunan pertanian Irak dapat menjadi salah satu solusi dan fokus bagi pemerintah Irak untuk tetap meningkatkan pendapatan negara di masa pandemi Covid-19 demi menjaga stabilitasi ekonomi negara. Dampak positif yang didapatkan oleh Irak apabila

memajukan pembangunan di bidang pertanian negara, diantaranya : dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dapat menjaga keamanan dan stabilitas kebutuhan pangan masyarakat di masa pandemi Covid-19, dapat meningkatkan PDB Irak di bidang pertanian, memajukan teknologi pertanian, Irak dapat meningkatkan pendapatan negara selain dari perdagangan minyak dan gas, dan dapat meningkatkan minat investor asing (Fathallah and Robertson, How the agri-food sector can turn Iraq's economy around 2020).

3.3 Interest, Stakes and Power

Menurut Allison *Interest, Stakes, and Power* yang dimiliki oleh setiap aktor pemain yang terlibat di dalam proses pengambilan keputusan kebijakan politik suatu negara dapat mempengaruhi hasil dari keputusan negara tersebut. *Bureaucratic Politic Models* memiliki konsep yaitu setiap pemikiran, kekuatan, dan argumen yang dimiliki oleh setiap aktor pemain dapat mempengaruhi hasil keputusan kebijakan politik negara. Faktor utama yang dapat mempengaruhi keputusan kebijakan politik negara, yaitu "*power*" dari setiap aktor pemain. Oleh karena itu, *Interest, Stakes, and Power* yang dimiliki oleh setiap aktor pemain terbagi menjadi beberapa kepentingan, yaitu kepentingan individu, kepentingan nasional (*National Interest*), kepentingan domestik, dan kepentingan organisasi atau institusi (Allison Graham T 1969).

Kepentingan setiap aktor pemain yang memiliki perbedaan tujuan dan pemikiran yang disampaikan pada saat proses *bargaining*. *Chief* yang merupakan aktor pemain yang memiliki "*power*" terbesar yang di perankan oleh Perdana Menteri Mustafa Al-kadhimi, kemudian dibantu oleh Dr. Alli Allawi dan Ihsan Abdul Jabbar Ismail yang juga memiliki tugas untuk menjaga kepentingan Nasional (*National Interest*) Irak. Tanggungjawab Mustafa Al-Kadhimi terhadap kepentingan nasional Irak setelah komitmen Irak untuk patuh terhadap regulasi OPEC tahun 2020 adalah menjaga stabilitas perekonomian negara agar tidak mengalami krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, serta disebabkan oleh harga minyak dunia yang turun (Release 2020). Kemudian kepentingan nasional Perdana Menteri Mustafa Al-Kadhimi di bidang industri minyak adalah menjaga kepatuhan Irak terhadap seluruh organisasi internasional, terutama OPEC. Hal

tersebut disampaikan melalui sebuah *statement* yang disampaikan oleh juru bicara kementerian perminyakan Irak pada saat pertemuan pers antara negara anggota OPEC yang dilaksanakan di Wina, Austria pada tanggal 6 Juni 2020 yaitu, *Iraq's Ministry of Oil spokesperson, Assem Jihad, said in a statement, "Despite the economic and financial circumstances that Iraq is facing, the country remains committed to the agreement"* (O. o. Countries 2020).

Interest, Stakes, and Power yang dimiliki oleh aktor pemain *Staff* memiliki persamaan kepentingan dengan *Chief*. *Staff* merupakan anggota legislatif yang bertugas di institusi pemerintahan memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh *Chief* untuk membantu menentukan keputusan di dalam parlemen. Sesuai dengan keputusan Irak untuk mematuhi regulasi pemotongan jumlah kuota produksi minyak tahun 2020, kepentingan Thamir Ghadhban yang menjabat sebagai Menteri Perminyakan Irak periode 25 Oktober 2018-6 Mei 2020 adalah kepentingan institusi pemerintahan yang berfokus terhadap kepentingan *National Interest* Irak. Hal tersebut disesuaikan dengan sebuah *statement* : *Thamer al-Ghadhban said in a statement that the "massive oil cut deal will help lower oil inventories and boost prices."* (Reuters, Iraqi oil minister says big oil cut deal will help to stabilize oil market 2020). Selain itu, *statement* lain dari Menteri Perminyakan Thamir Ghadhban yang mendukung perpanjangan regulasi pemotongan jumlah kuota produksi minyak di tahun 2020, yaitu : *"We have to give a positive signal to the market. At least we should roll over the present agreement which we signed in December last year for another year, for the whole of 2020, Ghadhban said* (Edwards 2019). Aktor pemain *Staff* selanjutnya diperankan oleh Awat Sheikh Janab yang menjabat sebagai Menteri keuangan wilayah Kurdistan (KRG) yang memiliki kepentingan di dalam industri minyak untuk mendukung keputusan *Chief* untuk mematuhi regulasi OPEC tahun 2020. Kepentingan Awat Sheikh Janab terhadap regulasi OPEC adalah demi menjaga kepatuhan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Terdapat sebuah *statement* yang disampaikan oleh Khalid Swani yang menjabat sebagai Menteri wilayah Kurdistan : *"The region must abide by the federal government's decision to reduce crude oil production"* (Memo 2020).

Berbeda dengan *Chief* dan *Staff*, *Ad Hocs* memiliki kepentingan lain yang mementingkan kepentingan organisasi dan domestik,. Kepentingan *Ad Hocs* yang mengarah di bidang ekonomi dan pembangunan muncul akibat komitmen Irak untuk patuh terhadap regulasi pemotongan jumlah kuota produksi minyak yang dibuat oleh OPEC pada tahun 2020 di masa pandemi Covid-19. Menteri perminyakan Arab Saudi Pangeran Abdul Aziz Bin Salman yang merupakan *Ad Hocs* memberikan dukungan terhadap Irak untuk tetap berkomitmen terhadap regulasi OPEC tahun 2020 di masa Pandemi Covid-19, yang dilandasi oleh kepentingan domestik Arab Saudi. Kepentingan domestik Arab Saudi yang disampaikan oleh Pangeran Abdul Aziz Bin Salman memiliki tujuan untuk mengendalikan harga minyak dunia, serta menjaga komitmen keanggotaan Irak dengan OPEC yang berusaha untuk dipertahankan oleh Arab Saudi (Mcque and Wang 2020).

Kepentingan Hadi Fathallah yang merupakan Direktur *NAMEA Group* , konsultan Bank Dunia, dan konsultan *The International Fund for Agricultural Development* (IFAD) untuk Irak adalah kepentingan organisasi internasional yang berfokus di bidang pengembangan pertanian dan pangan negara. Dengan adanya keputusan Irak mematuhi regulasi pemotongan jumlah kuota produksi minyak di masa pandemi Covid-19 yang dibuat oleh OPEC demi menaikkan harga minyak dunia yang turun dan ditambah dengan krisis ekonomi yang terjadi di Irak berdampak terhadap perkembangan pembangunan industri pertanian dan kondisi pangan masyarakat Irak (Fathallah and Robertson 2020). Dengan adanya hal tersebut, Hadi Fatallah yang merupakan konsultan IFAD untuk Irak berusaha untuk tetap merealisasikan program IFAD yang bertujuan untuk memajukan industri pertanian Irak, serta menjaga stabilitas pangan masyarakat di masa pandemi Covid-19. Strategi yang dibuat oleh IFAD Setelah Irak membuat keputusan untuk mematuhi regulasi OPEC tahun 2020 yaitu, IFAD segera berusaha untuk menarik perhatian pemerintah Irak untuk tertarik mengembangkan sektor non-minyak melalui industri pertanian yang dapat meningkatkan pendapatan negara atau GDP (*Gross Domestic Product*) dengan mengembangkan badan usaha milik negara di bidang pertanian (Ali and Obaid 2022).

3.4 *The Problem and The Problems*

Setiap proses pembentukan sebuah kebijakan politik suatu negara, memiliki fokus untuk menyelesaikan suatu masalah dan menentukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Setiap diskusi yang ada di dalam parlemen yang dilakukan oleh seluruh aktor pemain dalam menentukan sebuah kebijakan, tidak selalu berfokus untuk menyelesaikan permasalahan utama. Akan tetapi, permasalahan lain yang muncul dan dapat menghambat proses pengambilan kebijakan negara juga harus diselesaikan dengan cepat. Hal tersebut disebabkan oleh tuntutan waktu penyelesaian suatu masalah yang harus diselesaikan oleh seluruh aktor pemain. Tujuannya adalah demi mementingkan kepentingan nasional negara tersebut (Allison and Halperin 1972).

Permasalahan yang dihadapi oleh *Chief*, *Staff*, dan *Ad Hoc*s yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Irak dalam menangani permasalahan diberbagai bidang seperti, ekonomi, politik, sosial, pendidikan, keamanan wilayah, dan lain sebagainya. Krisis politik yang terjadi di Irak disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap kepemimpinan Perdana Menteri Adil Abdul Mahdi yang dinilai gagal dalam menjalankan sistem pemerintahan negara bersama dengan anggota kabinetnya (Younes 2019). Hal tersebut disebabkan oleh, meningkatnya tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, pemerintah negara yang bersifat tidak adil dan tidak membela kepentingan masyarakat, Intervensi Iran terhadap politik Irak, banyak terjadinya konflik dalam negeri, krisis ekonomi, aksi kekerasan pemerintah terhadap masyarakat sipil, serta sistem pemerintahan yang meliputi bidang ekonomi, layanan pelayanan masyarakat, dan bidang lainnya yang terkesan kuno (Rubin and Hassan 2019).

Dengan adanya krisis politik yang terjadi di masa kepemimpinan Perdana Menteri Adil Abdul Mahdi, menyebabkan munculnya aksi demonstrasi secara besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat Irak memiliki tuntutan untuk menggulingkan pemerintahan Irak di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Adil Abdul Mahdi. Selain itu tuntutan masyarakat terhadap calon Perdana Menteri baru Irak yaitu, merevolusi sistem ekonomi negara, memperbaiki sistem pelayanan masyarakat, memberantas tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, serta perluasan lapangan kerja bagi masyarakat (Hamasaheed and

Abouaoun 2019). Terpilihnya Mustafa Al-Kadhimi sebagai Perdana Menteri Irak yang dilantik pada bulan Mei Tahun 2020 harus menghadapi tantangan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Irak dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Irak, memperbaiki sistem politik dan ekonomi Irak (Kadhim 2020), memperbaiki hubungan kerjasama dengan negara lain, dan transparansi hukum dan politik (Khadim 2020). Pada saat proses pengambilan keputusan Irak untuk mematuhi regulasi pemotongan jumlah kuota produksi minyak yang dibuat OPEC tahun 2020 di masa pandemi Covid-19, kabinet pemerintahan Mustafa Al-Kadhimi harus menghadapi tantangan seperti, dampak persebaran pandemi Covid-19, turunnya harga minyak dunia, dan pemulihan kondisi politik Irak . Kemudian, konsekuensi yang harus dihadapi oleh pemerintah Irak setelah menyetujui untuk mematuhi regulasi OPEC tahun 2020 adalah merevolusi sistem perekonomian negara agar menjadi lebih modern, serta berusaha untuk memulihkan kondisi ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan harga minyak dunia yang turun (Iraq Oil Report n.d.).

Dengan adanya permasalahan yang terjadi di Irak, merupakan tanggungjawab yang harus diselesaikan oleh *Chief* yang memiliki kekuatan (*power*) tertinggi dalam menentukan keputusan, serta membela *National Interest* Irak yang dibantu oleh *Staff* yang memiliki kepentingan yang sama dengan *Chief*. Sementara itu, *Ad Hocs* merupakan aktor pemain yang mendukung keputusan Irak untuk mematuhi regulasi OPEC tahun 2020 merasa diuntungkan dengan komitmen Irak terhadap regulasi OPEC tersebut. Keuntungan tersebut didapatkan karena dapat memperlancar dan mempermudah keberlangsungan kepentingan *Ad Hocs* di Irak.

3.5 Actions Channels

Action Channels di dalam *Bureaucratic Politic Models* merupakan interaksi antar aktor pemain yang terjadi sebelum proses tawar-menawar (*bargaining*) dalam menentukan sebuah keputusan. Dalam hal ini, setiap rapat, pertemuan, dan diskusi yang dilakukan oleh antar aktor pemain merupakan interaksi yang dapat menghubungkan pemikiran antar aktor pemain, serta dapat mendukung jalannya birokrasi dalam menentukan keputusan (Allison Graham T 1969). *Action Channels*

yang dilakukan oleh *Chief*, *Staff*, dan *Ad Hoc*s adalah untuk mendiskusikan komitmen dan kepatuhan Irak terhadap regulasi pemotongan jumlah kuota produksi minyak di masa pandemi Covid 19 tahun 2020 yang dibuat oleh OPEC.

Diawali dengan diskusi yang dilakukan oleh Menteri Perminyakan Arab Saudi Ihsan Abdul Jabbar Ismail (*Ad Hoc*s) dan Menteri Perminyakan Irak Ihsan Abdul Jabbar Ismail (*Chief*) yang membahas pentingnya mematuhi regulasi pemotongan kuota produksi di masa pandemi Covid-19 yang dapat mengendalikan jumlah pasokan minyak di pasar internasional, serta menaikkan harga minyak dunia yang turun. Dengan adanya *bargaining* yang kuat dari *Ad Hoc*s, menyebabkan *Chief* memberikan pernyataan bahwa Irak tetap akan berkomitmen dan mematuhi regulasi OPEC tahun 2020. Pernyataan tersebut disampaikan pada saat pertemuan antara negara anggota OPEC dengan *non-OPEC* yang dilaksanakan pada tanggal 9, Juni 2020 di kota Wina, Austria (O. o. Countries 2020).

Kemudian, dukungan Irak untuk mematuhi regulasi OPEC tahun 2020 juga di dukung oleh mantan Menteri Perminyakan Irak Thamir Ghadbhan (*Staff*) yang menjabat sebagai Menteri Perminyakan Irak periode 25 Oktober-6 Mei 2020 yang mendorong *Chief* untuk tetap berkomitmen dan mematuhi regulasi OPEC tahun 2020. Hal tersebut disebabkan oleh seluruh negara produsen minyak mulai menjaga kepatuhannya dengan regulasi OPEC demi menaikkan harga minyak dunia yang turun di masa pandemi Covid-19. Selain itu, di masa kepemimpinan Thamir Ghadbhan di kementerian perminyakan Irak, Thamir Ghadbhan telah banyak membuat keputusan untuk mematuhi setiap regulasi pemotongan jumlah kuota produksi. Tujuannya adalah untuk menjaga kepatuhan Irak terhadap OPEC, demi menghindari konflik dan persaingan antar negara produsen minyak dalam memproduksi minyak, demi menjaga stabilitas harga minyak dunia, dan demi menjaga kebutuhan minyak di dunia internasional (Reuters 2020).

3.6 Action as Politics

Action as Politics yang terdapat di dalam *Bureaucratic Politics Models* menjelaskan tentang sebuah keputusan dan kebijakan negara ditentukan dengan adanya dorongan pendekatan politik yang dijalankan oleh setiap aktor pemain. *Action as Politics* adalah pemikiran dan kepentingan yang disampaikan *Staff*,

Indians, dan *Ad Hoc*s kepada *Chief*. Pendekatan politik tersebut dilakukan dengan negosiasi, pendekatan, dan penawaran yang kuat kepada *Chief*. Sehingga suatu pengambilan keputusan negara ditentukan oleh seberapa besar pendekatan politik yang dilakukan oleh aktor pemain terhadap *Chief* (Allison Graham T 1969).

Dorongan pendekatan politik yang dilakukan oleh Menteri keuangan Irak Dr. Ali Allawi kepada *Chief* untuk segera merevolusi sistem ekonomi negara setelah Irak menyetujui regulasi OPEC tahun 2020 yang berdampak terhadap kondisi perekonomian negara. Dorongan Dr. Ali Allawi kepada *Chief* yaitu mementingkan kepentingan nasional Irak untuk mengatasi krisis ekonomi yang telah terjadi, meskipun Irak telah berkomitmen dengan regulasi yang dibuat oleh organisasi internasional. Dengan segera merealisasikan kebijakan WPER yang digunakan untuk merevolusi sistem perekonomian negara, dapat dijadikan sebagai solusi Irak untuk meningkatkan perekonomian negara selain dari hasil perdagangan minyak, serta diharapkan dapat menyelesaikan krisis ekonomi yang terjadi di Irak dan dapat mensejahterakan masyarakat di masa pandemi Covid-19. Dr. Ali Allawi mendorong *Chief* untuk segera membuat keputusan membuat kebijakan keuangan negara demi kemajuan Irak. Pembahasan dan diskusi mengenai kebijakan WPER dilakukan pada saat pertemuan seluruh kabinet Menteri dengan *International Energy Agency* (IEA) (Government of Iraq 2020).

3.7 Stream of Outcome

Stream of Outcome Irak mematuhi regulasi OPEC tahun 2020, serta keputusan Irak untuk membuat kebijakan dalam negeri yang dibuat setelah Irak mematuhi regulasi OPEC tahun 2020 merupakan hasil dari proses *bargaining* yang dilakukan oleh aktor pemain *Chief*, *Staff*, dan *Ad Hoc*s. Kepentingan Mustafa Al-Kadhimi untuk tetap menjalankan dan mempertahankan kepentingan Nasional Irak merupakan fokus dan tanggungjawab para aktor pemain dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, hasil akhir keputusan yang diambil oleh para aktor pemain *Chief*, *Staff*, dan *Ad Hoc*s, meliputi :

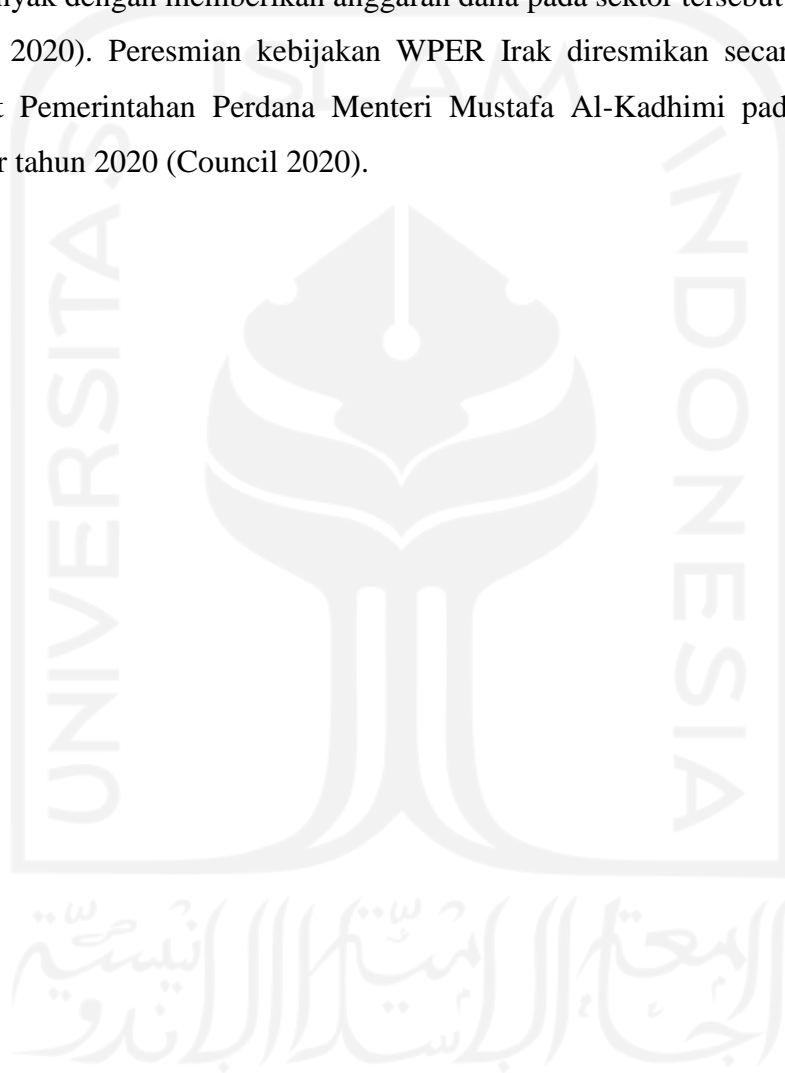
Irak tetap akan berkomitmen untuk mematuhi regulasi OPEC tahun 2020 pada kuartal kedua di bulan Mei hingga Desember dengan mempertimbangkan kondisi industri minyak dunia pada tahun 2020 di masa pandemi Covid-19

mengalami keterpurukan akibat harga minyak dunia yang turun dan akibat kegagalan kepatuhan negara-negara produsen minyak untuk mematuhi regulasi pemotongan jumlah kuota produksi minyak di bulan Maret tahun 2020 yang menyebabkan banyak negara produsen minyak saling bersaing dan berlomba untuk memperbanyak jumlah kuota produksi minyak. Selain itu, usaha Irak untuk menjaga kepatuhannya terhadap regulasi OPEC tahun 2020 juga didukung dengan kesiapan industri minyak di wilayah *Basra Oil Company* (BOC) untuk ikut membantu menjaga kepatuhan Irak terhadap regulasi OPEC 2020 dengan memproduksi minyak sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh OPEC (Institute 2020).

Kemudian, dengan adanya penurunan harga minyak dunia dan meluasnya persebaran pandemi Covid-19, Organisasi regional *Middle East and North Africa* (MENA) berusaha untuk mendesak negara anggotanya yang memproduksi minyak untuk mematuhi regulasi OPEC 2020. Tujuannya adalah untuk menstabilkan jumlah permintaan dan penawaran minyak dipasar internasional dan mengendalikan jumlah pasokan minyak dunia, serta bertujuan untuk menaikkan harga minyak dunia yang telah mengalami penurunan sejak munculnya pandemi Covid-19. Oleh karena itu, dengan adanya dorongan MENA kepada Irak untuk tetap mematuhi regulasi OPEC tahun 2020, kabinet pemerintahan Mustafa Al Kadhimi berusaha untuk tetap mematuhi regulasi OPEC tahun 2020 dan berusaha untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat penerapan regulasi tersebut, meskipun kabinet pemerintahan Mustafa Alkhadimi merupakan kabinet baru Irak (Shuker 2022).

Stream of Outcome lainnya yang dibuat oleh Chief, Staff, dan *Ad Hoc*s setelah Irak mematuhi regulasi OPEC tahun 2020 yaitu, pengambilan keputusan untuk membuat kebijakan dalam negeri yang berfokus di bidang ekonomi untuk meminimalisir dampak dan permasalahan yang ditimbulkan akibat mematuhi regulasi tersebut yang bertujuan untuk menjalankan dan membela kepentingan Nasional Irak. *White Paper for Economic Reform* (WPER) merupakan bentuk respon Irak terhadap krisis ekonomi yang terjadi di negaranya yang salah satunya disebabkan oleh regulasi pemotongan jumlah kuota produksi minyak di masa pandemi Covid-19 (Schuber 2020). Perumusan WPER merupakan solusi bagi Irak

untuk mengatasi masalah krisis ekonomi dan juga untuk mereformasi sistem ekonomu negara. Tujuan pertama WPER adalah membentuk program reformasi ekonomi dengan membuat rencana defisit anggaran dana demi menciptakan ruang fiskal bagi Irak. Dalam pelaksanaannya, reformasi ekonomi memiliki jangka waktu pendek hingga menengah sekitar (3-5 tahun). Tujuan kedua yaitu memperluas sektor ekonomi swasta dengan membangun dan mengembangkan sektor industri non-minyak dengan memberikan anggaran dana pada sektor tersebut (Government of Iraq 2020). Peresmian kebijakan WPER Irak diresmikan secara resmi oleh Kabinet Pemerintahan Perdana Menteri Mustafa Al-Kadhimi pada tanggal 13 Oktober tahun 2020 (Council 2020).



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam penelitian yang ditulis oleh penulis memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana proses Irak menyetujui regulasi OPEC tahun 2020, serta ingin mengetahui respon Irak setelah mematuhi regulasi OPEC tahun 2020 yang berpengaruh terhadap kondisi ekonomi negara. Dalam hal ini, penulis menggunakan *Bureaucratic Politics Models* yang dikemukakan oleh Graham Allison.T dalam menganalisis kebijakan Irak mematuhi regulasi OPEC,serta menganalisis kebijakan dalam negeri Irak setelah mematuhi regulasi tersebut. Proses Irak mematuhi regulasi OPEC yang melibatkan berbagai macam pihak yang berasal dari anggota parlemen Irak serta pihak diluar pemerintah Irak yang dikategorikan sebagai aktor pemain *Chief*, *Staff*, dan *Ad Hocs*.

Proses *Bargaining* yang dilakukan oleh setiap aktor pemain merupakan faktor utama suatu negara dalam menentukan kesuksesan pengambilan keputusan. Karena, pengaruh perbedaan pemikiran dan kepentingan yang dimiliki oleh setiap aktor pemain berpengaruh terhadap hasil akhir keputusan negara. Dalam keputusan Irak mematuhi regulasi OPEC tahun 2020, serta keputusan Irak untuk membuat kebijakan dalam negeri setelah mematuhi regulasi OPEC, seluruh aktor pemain *Chief*, *Staff*, dan *Adhocs* berusaha untuk mengedepankan kepentingan Nasional Irak, meskipun setiap aktor pemain memiliki perbedaan pemikiran dan kepentingan. Dengan adanya hal tersebut, seluruh aktor pemain bersepakat bahwa keputusan Irak untuk mematuhi regulasi OPEC tahun 2020 merupakan salah satu bentuk komitmen Irak terhadap segala keputusan yang dibuat oleh OPEC dan demi menjaga kepatuhan Irak terhadap OPEC, serta untuk menaikkan harga minyak dunia yang turun dan untuk menjaga jumlah pasokan minyak dunia di masa pandemi Covid-19. Dalam proses *Decision Making* Irak mematuhi regulasi OPEC 2020, para aktor aktor pemain *Staff* dan *Adhocs* berusaha untuk mendorong Menteri Perminyakan Ihsan Abdul Jabbar Ismail (*Chief*) untuk menyetujui regulasi OPEC tersebut. Kemudian, keputusan Perdana Menteri Mustafa Al-Kadhimi untuk memulihkan kondisi politik Irak yang sedang mengalami krisis merupakan faktor

yang menyebabkan seluruh aktor pemain memberikan dorongan dan keputusannya untuk komitmen Irak terhadap regulasi pemotongan jumlah kuota produksi minyak di masa pandemi Covid-19, dan keputusan Irak mematuhi regulasi OPEC tahun 2020 telah disetujui oleh anggota Parlemen.

Dengan adanya keputusan Irak mematuhi regulasi OPEC tahun 2020 yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian negara yang sedang mengalami krisis, para aktor pemain *Chief*, *Staff*, dan *Ad Hocs* bersepakat untuk membuat kebijakan dalam negeri yang termasuk sebagai bentuk respon Irak setelah mematuhi regulasi OPEC tersebut. Karena, tujuannya adalah demi tetap menjalankan kepentingan Nasional Irak, khususnya di bidang ekonomi dan demi mendukung *Chief* untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Irak. Keputusan Irak membuat kebijakan WPER merupakan solusi bagi Irak untuk meningkatkan perekonomian negaranya di masa pandemi Covid-19 akibat harga minyak dunia yang turun dan kepatuhan Irak terhadap regulasi OPEC tahun 2020. Kebijakan WPER merupakan bentuk rencana dan strategi revolusi ekonomi Irak selama 3 hingga 5 tahun yang memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian negara selain dari hasil perdagangan minyak dan untuk mengeluarkan Irak dari krisis ekonomi yang terjadi akibat sistem perekonomian negara yang kuno dan pandemi Covid-19. Selain itu, kebijakan WPER diharapkan dapat menjadi solusi bagi Irak untuk menambah anggaran dana yang digunakan untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat di masa pandemi Covid-19, dapat digunakan untuk membangun infrastruktur negara, dan menjadi solusi bagi Irak untuk mendapatkan anggaran dana tambahan di bidang kesehatan untuk menangani kasus masyarakat yang terinfeksi Covid-19, serta untuk menghentikan persebaran wabah pandemi Covid-19.

4.2 Rekomendasi

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian yang ditulis oleh penulis dengan judul “Keputusan Irak Mematuhi Regulasi OPEC Pada Tahun 2020 Ditinjau Dengan Menggunakan *Bureaucratic Politics Models* masih terdapat kekurangan. Kekurangan yang terdapat di dalam hasil penelitian yang ditulis oleh penulis meliputi hasil analisis dan terkait dengan penulisan. Hasil penelitian ini hanya menjelaskan tentang proses keputusan Irak untuk mematuhi regulasi OPEC tahun

2020 di masa pandemi Covid-19 serta menjelaskan bentuk respon Irak setelah mematuhi regulasi tersebut dengan membuat kebijakan dalam negeri di bidang ekonomi yang berfungsi untuk meminimalisir resiko dan dampak setelah mematuhi regulasi OPEC demi tetap menjaga kepentingan nasional Irak. Oleh karena itu, rekomendasi bagi penulis selanjutnya yang ingin membahas isu yang sama adalah melihat bagaimana hasil penerapan kebijakan dalam negeri Irak setelah mematuhi regulasi OPEC tahun 2020, serta melihat bagaimana perkembangan industri dan perdagangan minyak Irak setelah mematuhi regulasi OPEC 2020 tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Akram Naemah, and Ali Abbas Obaid. 2022. "Implications of The Covid-19 Outbreak on The Energy Market and Iraqi Economy." *Journal of Positive School Psychology* Vol. 6, No.3, 5901-5913.
- Al-Khayat, Faleh. 2022. *Once an OPEC Quota Buster, Iraq Struggles to Raise Oil Output Due to Port Limitations*. 28 Juli. Accessed Oktober 25, 2022. <https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/oil/072822-once-an-opec-quota-buster-iraq-struggles-to-raise-oil-output-due-to-port-limitations>.
- Allison Graham T. 1969. "The american political science review: Conceptual models and the cuban missile crisis." *American Political Science Association* 689-718.
- Allison, Graham T, and Morton H Halperin. 1972. "Bureaucratic politics: A paradigm and some policy implications." *Cambridge Journals* (Cambridge University Press) 24(1), 40-79.
- Alnasrawi, Sultan Jasem, Hussein Ali Abed, and Hamdia Shaker Muslim. 2020. "Impact of COVID-19 outbreak on the global economy : A case of Iraq." *Talent Development & Excellence* 12(2), 2923-2924.
- Alzuwaini, H, D Vasil'kov, A Khitrov, V Tolmachev, R Okorokov, O Gatsenko, and D Zaripova. 2018. "Problems of protelemum industry in Iraq." *Earth and Environmental Science*. Russia: IOP. 1-7.
- Asaad, Z A. 2021. "Oil price, gold price, exchange rate and stock market in Iraq pre-during COVID19 outbreak: An ARDL approach." *International Journal of Energy Economics and Policy* 11(5), 562–571.
- Colgan, Jeff D. 2014. "The emperor has no clothes: The limits of OPEC in the global oil market." *Cambridge Journals* 68(3), 599-632.
- Council on Foreign Relations. 2020. *Between a Rock and a Hard Place: Iraq's Pledge to Cut Oil Production*. 1 Mei. <https://www.cfr.org/blog/between-rock-and-hard-place-iraqs-pledge-cut-oil-production>.
- Council, Atlantic. 2020. *Evaluating Iraq's New White Paper on Economic Reform*. 30 Oktober. Accessed Januari 16, 2022. <https://www.atlanticcouncil.org/event/evaluating-iraqs-new-white-paper-on-economic-reform/>.
- Countries, Organization of The Petroleum Exporting. 2020. *New Oil Minister confirms Iraq's full commitment to OPEC and non-OPEC decisions*. 9 Juni. Accessed Desember 30, 2022. https://www.opec.org/opec_web/en/5982.htm.
- Countries, Organization of The Petroleum Exporting. 2020. *Iraq renews its full commitment to OPEC+ Decisions*. 06 Juni. Accessed Desember 14, 2022. https://www.opec.org/opec_web/en/5962.htm.
- Creswell, John W, and J. David Creswell. 2018. *Fifth edition research design qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. London, New Delhi, and Singapore: SAGE Publications.
- Davison, John. 2020. *Iraq's new government completed as remaining ministries filled*. 06 June. Accessed Agustus 09, 2022. <https://www.reuters.com/article/uk-iraq-politics-idUKKBN23D0LA>.

- Edwards, Rowena. 2019. *Iraq Does Not Support Deeper OPEC+ Cuts : Ghadhban*. 4 Desember. Accessed 12 19, 2022. <https://www.argusmedia.com/en/news/2027915-iraq-does-not-support-deeper-opec-cuts-ghadhban>.
- Faisol, Wildan. 2018. "Arab Saudi dan krisis minyak tahun 2014-2016 (Saudi Arabia and the oil price crisis of 2014-2016)." *Jurnal Hubungan Internasional* 10(19),13-24.
- Fathallah, Hadi, and Timothy Robertson. 2020. *How the agri-food sector can turn Iraq's economy around*. 28 Desember. Accessed Januari 16, 2023. <http://iraqieconomists.net/en/2020/12/28/how-the-agri-food-sector-can-turn-iraqs-economy-around/>.
- Fathallah, Hadi, and Timothy Robertson. 2020. *How the agri-food sector can turn Iraq's economy around*. 09 Desember. Accessed September 19, 2022. <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/how-the-agri-food-sector-can-turn-iraqs-economy-around/>.
- Gamal, Rania El, Ahmed Aboulenin, and Dmitry Zhannikov. 2020. *With a battered economy, Iraq debates its contribution to OPEC+ oil cuts*. 11 September. <https://www.reuters.com/article/oil-opec-iraq-idINKBN26207Q>.
- Government of Iraq. 2020. *Ministerial Roundtable discussions express support for Iraqi government economic reforms*. 24 Juli. <https://gds.gov.iq/ministerial-roundtable-discussions-express-support-for-iraqi-government-economic-reforms/>.
- . 2020. *Ministerial Roundtable discussions express support for Iraqi government economic reforms*. 24 Juli. Accessed Januari 11, 2022. <https://gds.gov.iq/ministerial-roundtable-discussions-express-support-for-iraqi-government-economic-reforms/>.
- . 2020. *The White Paper for Economic Reforms: vision and key objectives*. 22 Oktober. Accessed Januari 16, 2023. <https://gds.gov.iq/iraqs-white-paper-for-economic-reforms-vision-and-key-objectives/>.
- Grammas, George N. 1991. "Multilateral responses to the Iraqi invasion of Kuwait: Economic sanctions and emerging proliferation controls." *Maryland Journal of International Law* 15(1), 4-21.
- Hamasaeed, Sarhang, and Ellie Abouaoun. 2019. "Protesters Ousted a Prime Minister. Now What." *Small Wars Journal*, 5 Desember.
- House, Freedom. 2020. *Freedom in the world 2020*. report news, Washington DC: freedom house.
- Husein, Ahmad I. 2021. "Impact of (COVID-19) on Iraqi Oil Prices." *Journal of Economics, Business and Market Research (JEBMR)* Vol.4, No.2, 413-416.
- Ilahi, Ridho. 2018. "Dampak kebijakan pemangkasan produksi minyak dunia oleh organization of the petroleum exporting countries (OPEC) terhadap Indonesia pada tahun 2016." *JOM FISIP* 5(1), 1-4.
- Institute, knowledge Energy. 2020. *Iraq's OPEC+ compliance to fall short of target*. Article in website and record page, London, United Kingdom: Energy Institute. <https://knowledge.energyinst.org/search/record?id=114025>.
- International Monetary Fund. 2021. *International Monetary Found*. 11 Februari. <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/02/10/Iraq-2020->

- Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-Executive-50078.
- International Trade Administration. 2021. *Iraq-Country Commercial Guide*. 2 November. Accessed November 24, 2022. <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/iraq-oil-and-gas-equipment>.
- Iraq Oil Report. n.d. *Top Energy Stories*. Accessed Desember 23, 2022. <https://www.iraqoilreport.com/this-week/iraqs-electricity-plans-opec-extends-cuts-43566/>.
- Ishaq, Mohamed Riad. 2021. "white paper" *Reforms for the oil and gas sectors: Paving the way for better use of Iraq's resources?* 28 January. Accessed July 23, 2022. <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/white-paper-reforms-oil-and-gas-sectors-paving-way-better-use-iraqs-resources>.
- Kadhimi, Abbas. 2020. *Challenges for Iraq's new government under Mustafa Al-Kadhimi*. 22 April. Accessed Desember 23, 2022. <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/challenges-for-iraqs-new-government-under-mustafa-al-kadhimi/>.
- Kementrian Luar Negeri. n.d. *Embassy of Republic of Indonesia in Baghdad Irak*. <https://kemlu.go.id/baghdad/en/read/republik-irak/2001/etc-menu>.
- Khadim, Abbas. 2020. *Mustafa al-Kadhimi's Iraq: Challenges and Prospects*. 2 November. Accessed Desember 29, 2022. <https://arabcenterdc.org/resource/mustafa-al-kadhimis-iraq-challenges-and-prospects/>.
- Kutlu, Ovunc. 2020. *Iraq confirms full commitment to new OPEC oil deal*. 09 06. Accessed 09 07, 2022. <https://www.aa.com.tr/en/energy/international-organization/iraq-confirms-full-commitment-to-new-opec-oil-deal/29524>.
- Lake, Ralph B., and David R. Reitsema. 1972. "The Iraqi nationalization of the Iraq petroleum company: Implications for the international law of expropriation." *Denver Journal of International Law and Policy* 2(2), 217-230.
- Loveluck, Louisa. 2020. *Iraq Name News Prime Minister, Paving The Way to Tackle Nation's Deepening Crisis*. 07 Mei. Accessed November 10, 2022. https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/iraq-names-new-prime-minister-paving-the-way-to-tackle-the-deepening-crisis/2020/05/07/2340e600-9039-11ea-9322-a29e75effc93_story.html.
- Mansour, Renand. 2020. *Iraqi is Trying Yet Again to Form a Government. Why is it so Hard ?* 15 April. Accessed November 09, 2022. <https://www.washingtonpost.com/politics/2020/04/15/iraq-is-trying-yet-again-form-government-why-is-it-so-hard/>.
- Martin, Ali. 2022. "Covid-19 dan krisis energi : Studi kasus kebijakan OPEC terhadap pengurangan produksi minyak di masa pandemi COVID-19." *SPEKTRUM Jurnal Hubungan Internasional* 19(1), 101-116.
- Mcque, Katie, and Herman Wang. 2020. *Saudi Money, US Pressure Coaxes Iraq on OPEC Oil Cut Compliance*. 1 Juli. Accessed Desember 19, 2022. <https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/oil/070120-saudi-money-us-pressure-coaxes-iraq-on-opec-oil-cut-compliance>.
- Memo, Middle East Monitor. 2020. *Kurdistan, Iraq discuss oil production* . 20 April. Accessed Januari 12, 2022.

- <https://www.middleeastmonitor.com/20200420-kurdistan-iraq-discuss-oil-production/>.
- Nakle, Carole. 2021. *How Iraq Can Move Beyond The Oil Sector*. 18 October. Accessed July 11, 2022. <https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/how-iraq-can-move-beyond-oil-sector-32014>.
- Organization of Petroleum Exporting Countries. 2022. *Welcoming remarks by Iraq's Minister of Oil*. 19 June. https://www.opec.org/opec_web/en/6914.htm.
- Organization of The Petroleum Exporting Countries. 2020. *Iraq Renews its Full Commitment to OPEC+ Decisions*. https://www.opec.org/opec_web/en/5962.htm.
- Organization of the Petroleum Exporting Countries. 2019. *Iraq's Minister of Oil: Cooperation will enhance market stability and investment potential*. 12 Juli. https://www.opec.org/opec_web/en/5621.htm.
- Relations, Council on Foreign. 2020. *Between a Rock and a Hard Place : Iraq's Pledge to Cut Oil Production*. 1 Mei. Accessed November 22, 2022. <https://www.cfr.org/blog/between-rock-and-hard-place-iraqs-pledge-cut-oil-production>.
- Release, Press. 2020. *Covid-19 and Low Oil Prices Push Millions of Iraqis into Poverty*. 11 November. Accessed Desember 14, 2022. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/11/11/new-world-bank-report-calls-for-urgent-fiscal-stimulus-and-economic-reforms-to-help-the-poor-and-the-most-vulnerable-in-iraq>.
- Releases, Press. 2020. *Prime Minister Mustafa Al-Kadhimi*. 20 Juni. Accessed November 23, 2022. <https://www.pmo.iq/pme/press2020en/20-6-20201en.htm>.
- Reuters. 2020. *Iraq seeks exemption from OPEC export cut deal next year*. 02 September. Accessed Oktober 05, 2022. <https://www.reuters.com/article/iraq-oil-opec-idINKBN25T0U2>.
- . 2020. *Iraqi oil minister says big oil cut deal will help to stabilize oil market*. 13 April. Accessed Desember 30, 2022. <https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/oil-and-gas/iraqi-oil-minister-says-big-oil-cut-deal-will-help-to-stabilize-oil-market/75116407>.
- . 2020. *Iraqi oil minister says big oil cut deal will help to stabilize oil market*. 13 April. Accessed Desember 19, 2022. <https://www.reuters.com/article/us-global-oil-opec-iraq-idCAKCN21U0WY>.
- Rubin, Allisa J., and Fallih Hassan. 2019. *Iraqi Prime Minister Resigns in Deepening Political Crisis*. 30 November. Accessed Desember 23, 2022. <https://www.nytimes.com/2019/11/30/world/middleeast/adel-abdul-mahdi-resigns-iraq.html>.
- Rudaw. 2020. *KRG and Baghdad Pledge to Slash Oil Production as Part of OPEC Deal*. 19 Apri. Accessed Oktober 25, 2022. <https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/190420202>.
- S&P Global Comodity Insight. 2022. *Once an OPEC quata buster, Iraq struggles to raise oil output due to port limitations*. 28 Juli. <https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/oil/072822-once-an-opec-quota-buster-iraq-struggles-to-raise-oil-output-due-to-port-limitations>.

- Schuber, Barik. 2020. "Iraq White Paper ." *iraqieconomists.net*. 19 Oktober. Accessed Januari 16, 2023. <http://iraqieconomists.net/en/2020/10/19/iraq-white-paper-complete-english-translation/>.
- Shuker, Zeinab. 2022. *Economic Development and the Future of the White Paper in Post-Election Iraq*. 27 Januari. Accessed Agustus 07, 2022. <https://www.epc.ae/en/details/featured/economic-development-and-the-future-of-the-white-paper-in-post-election-iraq>.
- The World Bank. 2020. *COVID-19 and Low Oil Prices Push Millions of Iraqis Into Poverty*. 11 November. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/11/11/new-world-bank-report-calls-for-urgent-fiscal-stimulus-and-economic-reforms-to-help-the-poor-and-the-most-vulnerable-in-iraq>.
- U.S international Information Administration. 2022. *Iraq*. 28 September. Accessed Oktober 05, 2022. <https://www.eia.gov/international/analysis/country/irq>.
- VOA. 2020. *OPEC, Rusia Sepakat Pangkas Produksi Minyak Mentah Hingga Juli*. 07 Juni. <https://www.voaindonesia.com/a/opec-rusia-sepakat-pangkas-produksi-minyak-mentah-hingga-juli-/5452661.html>.
- Younes, Ali. 2019. *Adel Abdul Mahdi, An Iraqi Prime Minister 'Doomed to Fail'*. 1 Desember. Accessed Desember 23, 2022. <https://www.aljazeera.com/news/2019/12/1/adel-abdul-mahdi-an-iraqi-prime-minister-doomed-to-fail>.

